



EDUKASI KONSUMEN

TRIWULAN IV 2022

SIKAPIUANGMU.OJK.GO.ID



SAAT HASIL SURVEI NASIONAL
LITERASI DAN INKLUSI
KEUANGAN TAHUN 2022
MEMACU OPTIMISME



**KELUARGA
SIKAPI**



Dewan Pelindung:

Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK)

Dewan Penasehat:

Friderica Widyasari Dewi (Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:

Sarjito (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

Redaktur Ahli:

Kristrianti Puji Rahayu (Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Hubungan Masyarakat), Agus Fajri Zam (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen), Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Rela Ginting (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK), Edwin Nurhadi (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan), Darmansyah (Direktur Hubungan Masyarakat) Bernard Widjaja (Direktur Market Conduct), Sabar Wahyono (Direktur Pelayanan Konsumen), Tri Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen).

Redaktur:

Yulianta (Deputi Direktur Literasi dan Informasi)

Redaksi:

Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi:

Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350

Telepon: (021) 29600000

Redaksi menerima kiriman naskah dan berhak mengedit naskah tanpa menghilangkan intisari dari artikel sebelum dipublikasikan

Hasil Survei Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 yang Menggembirakan

Hasil pengukuran rutin indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 menjadi kabar gembira bagi industri keuangan dan semua pihak.

Survei yang diselenggarakan dalam periode Juli hingga September 2022 menjangkau 34 provinsi yang mencakup 76 Kabupaten/Kota serta melibatkan 14.634 responden dalam usia 15 s.d. 79 tahun. Metode, parameter dan indikator untuk pengukuran literasi disamakan dengan survei sebelumnya sehingga dapat mengukur pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku. Sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*).

Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10% meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19%. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16% di tahun 2019 menjadi 35,42% pada 2022.

Hasil menggembirakan lainnya di sisi gender, untuk pertama kalinya, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi yakni sebesar 50,33% dibanding laki-laki 49,05%. Hal ini tidak terlepas dari upaya OJK menjadikan perempuan sebagai sasaran prioritas dalam arah strategis literasi keuangan. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan laki-laki lebih tinggi yakni sebesar 86,28%, dibanding indeks inklusi keuangan perempuan di angka 83,88%.

Tentu capaian ini masih meninggalkan pekerjaan besar. Pasalnya, pemerintah telah meningkatkan target yang harus dicapai dalam literasi keuangan masyarakat. Peningkatan target, pada 2024, pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90%. Langkah yang diyakini akan mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

Dalam edisi ini juga disampaikan sejumlah kegiatan edukasi dan inklusi lainnya seperti penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Juga disampaikan mengenai perkembangan terbaru dalam industri keuangan baik dalam edukasi maupun peningkatan pemahaman. ●

DAFTAR ISI TRIWULAN IV 2022

2 SALAM REDAKSI

4 SAJIAN UTAMA

- Upaya Memacu Literasi Perempuan Membuahkan Hasil
- **SNLIK 2022**
PR Literasi di Pasar Modal
- *Gap* Literasi Keuangan Desa dan Kota Semakin Menyempit
- Tantangan Menghidupkan Denyut *Fintech*
- Pertumbuhan Literasi dan Inklusi Keuangan Semakin Merata

10 PERSPEKTIF

- Kesepakatan di KTT G20 Bali untuk Dunia
- *Finance Track 6* Agenda Prioritas Indonesia dalam Kepemimpinan G20

13 EDUINVEST

- **CMSE 2022**
Mendorong Edukasi Saat Semakin Ramainya Investor dan Emiten Baru
- **World Investor Week 2022**
Mendorong Peningkatan Kualitas Investor

15 EDUPERBANKAN

- Setelah Undang-Undang Data Pribadi Disahkan
- Memastikan Keamanan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

17 EDUIKNB

- Lebih Nyaman dengan Asuransi Kredit

19 EDUTEK

- Tingkatkan Literasi Keuangan dengan Mudah dan Gratis Lewat LMS Edukasi Keuangan

21 EDUSYARIAH

- Akses Masyarakat ke Produk Keuangan Syariah Meningkat
- Edukasi Keuangan Menggema di Hari Santri 2022

23 KONSUMEN BICARA

- Data IDEB SLIK Sebagai Alasan Penolakan Kredit
- Atur Keuangan dengan Baik, Hindari Aset Dilelang

25 LAPOR OJK

- Data Layanan dan Kontak OJK Data Pengaduan Triwulan IV Tahun 2022
- Produk Pembiayaan Paling Banyak Diadukan Konsumen

27 TANYA OJK

- Data Layanan dan Kontak OJK Data Pertanyaan Triwulan IV Tahun 2022
- Pertanyaan Terkait Pinjol Multiguna Mendominasi

29 VISUALISASI

- Iklan Lembaga Keuangan Harus Tepat!

31 INFOGRAPHIA

- Data Layanan dan Kontak OJK Periode 1 Januari 2022 – 9 Desember 2022



45

KABAR OTORITAS

SiMolek Edutainment: Meningkatkan Literasi Keuangan dengan Menghibur

- Capaian Edukasi dan Perlindungan Konsumen

33 OJK MENYAPA

- Pacu Peningkatan Pemahaman Produk Keuangan dengan Revisi POJK 76 tahun 2016

- OJK Gandeng KPK Antisipasi Korupsi Sektor Keuangan

35 WIRUSAHA

- Dukungan Sektor Keuangan untuk Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia
- *Fintech Aggregator* Berperan Membawa UMKM ke Ranah Global

37 WASPADA INVESTASI

- Modus Penipuan Berkedok Investasi Melalui Penjualan Toko *Online*

39 QUIZ SIKAPI UANGMU

- Teka-Teki Sikapi (TTS)

40 INSPIRASI

- Pandu Sjahrir, Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)

42 SOSOK

- Yohanes Arts Abimanyu, Direktur Utama IdScore Indonesia

43 KABAR OTORITAS

- BIK 2022: Akselerasi Keuangan Hingga ke Ujung Indonesia

46 TELAHAH PRODUK

- Mengenal Deposito *On Call*, Salah Satu Alternatif Menyimpan Uang

47 LITERASIKUANGANPEDIA

- *Little Women*, Agar Uang Bukan Menjadi 'Segalanya'

48 TRIVIA

- Berkenalan Lebih Jauh dengan iDebKu

49 TAHUKAH ANDA

- Membedah Modul Literasi Keuangan Digital

50 INSIGHT

- Pentingnya Resolusi Keuangan Tahunan

37

WASPADA INVESTASI

Tindak Tegas OJK Berantas Pinjol Ilegal Hingga Investasi Bodong



4

SAJIAN UTAMA

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Terus Meningkat





Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Terus Meningkatkan

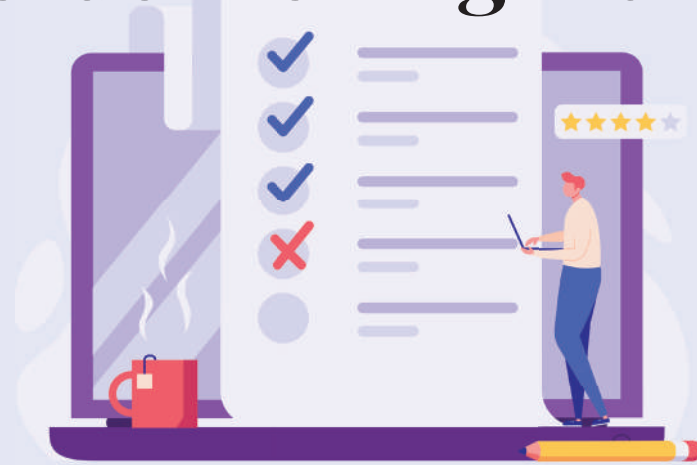
Di tengah dorongan untuk secepatnya pulih dari pandemi Covid-19, dunia masih diselimuti berbagai tantangan berat berupa inflasi dan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Namun, kondisi yang sangat berat itu membuat dunia juga harus beradaptasi dengan teknologi. Termasuk dalam industri keuangan.

Tantangan itu tidak membendung upaya masyarakat, termasuk di Indonesia, untuk semakin terlibat dan memahami industri keuangan. Situasi ini, salah satunya, tercermin dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022.

SNLIK merupakan survei berskala nasional yang diselenggarakan tiap tiga tahun sekali oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai namanya, survei ini dilakukan dalam rangka memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka, dibantu sistem *computer assisted personal interviewing* (CAPI).

Pada survei kali ini, OJK melakukan survei terhadap 14.634 responden yang tersebar di 34 provinsi. Rinciannya 50,58% laki-laki dan 49,42% perempuan, dengan latar belakang pendidikan variatif, dari mulai tidak sekolah/tidak lulus SD hingga lulus S3.

Rentang usia responden berada pada 15 hingga 79 tahun, dengan proporsi terbesar (25,42%) adalah responden berusia 40 hingga 49 tahun serta 30 hingga 39 tahun (24,03%).



Tingkat variasi dan jangkauan sampel tersebut meluas. Sebagai pembandingan, pada survei edisi sebelumnya yang dilakukan pada 2019 mencakup 12.773 responden.

Sampel yang makin luas tidak menghalangi survei untuk memotret kondisi yang lebih baik. Sebab, nyatanya, hasil survei menunjukkan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan mengalami kenaikan.

Sebagai catatan, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap atau perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sementara inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Pada sisi literasi keuangan, tingkat pemahaman masyarakat sudah mencapai 49,68%. Meski nilainya masih di bawah separuh, tingkat pemahaman dan kecakapan

masyarakat ini menanjak pesat dibandingkan persentase 38,03% pada tahun 2019.

Sedangkan pada indikator inklusi keuangan, tampak pula kenaikan signifikan menjadi 85,10% dibanding persentase sebelumnya, 76,19% dalam kurun 3 tahun terakhir.

Indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 50,52% dan 86,73%, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yakni sebesar 48,43% dan 82,69%. Namun, gap indeks literasi keuangan semakin mengecil dari 6,88% di tahun 2019 menjadi 2,10% di tahun 2022. Sedangkan gap indeks inklusi keuangan juga semakin mengecil dari 15,11% di tahun 2019 menjadi 4,04% di tahun 2022.

“Literasi dan inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis. Sehingga diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19,” ujar Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar. ●



Upaya Memacu Literasi Perempuan Membuahkan Hasil

Fokus meningkatkan literasi keuangan bagi perempuan yang dipandu OJK dalam 10 tahun ke belakang dan meningkat pesat dalam 3 tahun terakhir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Indeks literasi keuangan perempuan berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 untuk pertama kalinya melewati laki-laki.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi menuturkan hasil nyata semakin kuatnya literasi keuangan perempuan tidak lepas dari strategi sasaran prioritas dalam arah strategis literasi keuangan.

“Karena kami melihat pentingnya peranan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga dan juga peran perempuan yang sangat penting dalam memberikan

pendidikan atau edukasi keuangan terhadap anak-anaknya,” jelas Friderica mengenai strategi prioritas meningkatkan literasi keuangan kepada perempuan, Selasa (22/11/2022).

Dalam hasil SNLIK 2022, indeks literasi keuangan perempuan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Untuk pertama kalinya, indeks literasi keuangan perempuan mencapai 50,33%, sedangkan laki-laki 49,05%. Sebagai patokan, hasil survei pada 2019 menunjukkan literasi keuangan perempuan masih berada pada tingkat 36,13%, dengan literasi laki-laki 39,94%.

Literasi keuangan sangat bermanfaat karena masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik akan mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan termasuk mampu merencanakan keuangan dengan lebih baik. Selain itu, mereka juga

akan terhindar dari tawaran investasi ilegal.

Peningkatan literasi ini membuat tingkat inklusi keuangan perempuan meningkat. Survei menunjukkan bahwa inklusi keuangan perempuan meningkat menjadi 83,88% pada 2022 berbanding 75,15% pada 2019.

Meski demikian, inklusi keuangan pada perempuan ini belum melewati inklusi kelompok gender laki-laki yang berada pada level 86,28%. Terjadi pelebaran *gap* inklusi pada kelompok gender karena sebelumnya di tahun 2019, inklusi keuangan laki-laki berada pada level 77,24%.

Meski demikian, secara keseluruhan hasil SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi dan inklusi keuangan yang terus meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan *gap* antara indeks literasi dan inklusi keuangan yang semakin menurun dari 38,16% di periode 2019 menjadi 35,42% pada 2022. ●



SNLIK 2022

PR Literasi di Pasar Modal

Hasil menggembirakan dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan nasional yang terpotret dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 tidak membuat industri melonggarkan semangat lebih baik. Terdapat sejumlah sektor keuangan yang memerlukan kerja ekstra untuk memperkuat industri keuangan di tengah masyarakat.

Dalam temuan survei terbaru, indeks literasi keuangan di sektor pasar modal masih tertahan di angka 4,11% tahun 2022. Terjadi pergeseran karena pada periode survei 2019, indeks literasi pasar modal berada pada angka 4,92%.

Saat ini literasi membutuhkan partisipasi pemangku kepentingan untuk mendorong lebih tinggi, berbeda dengan indeks inklusi. Partisipasi masyarakat terjadi peningkatan. Tepatnya dari 1,55% pada 2019 menjadi 5,19% pada survei 2022.

“Itu [peningkatan inklusi di pasar modal] adalah kabar baik. Tapi bukan kabar yang sangat baik, karena literasinya tidak naik. Artinya, masyarakat kita tidak makin mengerti walaupun mungkin mereka berinvestasi (ke pasar modal),” ujar Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar.

Inklusi yang meningkat memang searah dengan capaian pasar modal Indonesia yang tahun ini telah membukukan jumlah investor lebih dari 10 juta. Namun, Mahendra mengingatkan bahwa peningkatan

ini justru menjadi perhatian serius bagi OJK karena jika tidak diikuti dengan literasi dapat menjadi bumerang bagi industri.

“Jadi, ayo. Itu harus kita perbaiki dan harus kita dekati bersama. Ini bukan hanya tentang 10 juta SID, tapi juga tentang kualitas 10 juta investor.”

Menurut Mahendra, OJK menekankan lima strategi kebijakan untuk merespons tantangan saat ini. Mulai dari melanjutkan stimulus relaksasi pelaku pasar modal untuk merespons dampak pandemi, dukungan emiten skala kecil agar dapat mengakses permodalan melalui penawaran umum di pasar modal, hingga kebijakan meningkatkan jumlah emisi maupun produk dan instrumen pasar modal.

OJK juga akan terus menggodok dan menyempurnakan kebijakan dalam meningkatkan kepercayaan investor, serta menambah kebijakan terkait implementasi keuangan berkelanjutan.

Kendati demikian, Mahendra juga menambahkan bahwa OJK tidak bisa bergerak sendirian. Fokus kebijakan tersebut, menurutnya, perlu disikapi pula dengan selaras baik oleh pelaku pasar modal maupun *stakeholder* lain untuk terus mengedukasi investor. Khususnya investor publik.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa BEI

akan terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan OJK. BEI dan OJK juga akan terus mengintensifkan upaya meningkatkan literasi pasar modal dengan melakukan berbagai kegiatan bersama berbagai pihak di seluruh daerah di Indonesia. Tujuannya agar pemahaman masyarakat tentang pasar modal lebih merata lagi.

“BEI akan bekerja sama dengan seluruh komponen seperti perguruan tinggi, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, dan media,” ujar dia.

Tantangan yang menanti OJK bukan hanya perihal literasi di pasar modal. Sebab di sektor industri keuangan lain, literasi juga perlu ditingkatkan seperti lembaga keuangan mikro (14,44%) dan *fintech* (10,90%), literasi masyarakat juga masih rendah meski telah jauh membaik dari kondisi 3 tahun lalu.

Kebijakan pada sektor-sektor tersebut, yang didukung oleh keseriusan *stakeholder* memacu literasi diharapkan dapat menghadirkan dampak positif.

Sehingga, setidaknya, literasi di sektor-sektor yang masih lemah secara indeks dapat mengimbangi peningkatan literasi di beberapa sektor. Seperti perbankan yang sudah menembus 49,93%, atau perasuransian dan dana pensiun yang juga membukukan pertumbuhan signifikan dengan masing-masing secara berurutan menjadi 31,72% dan 30,46%. ●



Gap Literasi Keuangan Desa dan Kota Semakin Menyempit

Kabar baik bagi pejuang edukasi keuangan tanah air. Indeks literasi keuangan masyarakat di perkotaan dan perdesaan semakin menyempit. Buah kerja keras meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk keuangan selama bertahun-tahun.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 mencatat, *gap* literasi keuangan masyarakat perdesaan dan perkotaan mengalami penyempitan setelah terjadi peningkatan masif dibandingkan survei 3 tahun lalu.

Tercatat, literasi keuangan masyarakat perdesaan dalam survei tahun 2022 ini menjadi 48,43%. Bandingkan dengan survei terdahulu dengan pencapaian 34,53%. Artinya terdapat lompatan literasi 13,90% di perdesaan dalam 3 tahun terakhir.

Literasi di perkotaan juga mengalami peningkatan yang tinggi meski di bawah perdesaan. Pada survei sebelumnya di tahun 2019, level literasi masyarakat kota mencapai 41,41%. Dalam hasil SNLIK 2022, indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan melompat menjadi 50,52% atau dengan kata lain meningkat 9,11%.

Pencapaian masif ini menjadikan *gap* literasi keuangan penduduk perkotaan dan perdesaan menyempit. Jika sebelumnya pada 2019 *gap* tercipta sebesar 6,88%, kini menjadi 2,09%.



Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, menuturkan hasil survei ini menjadi salah satu tolak ukur bagi otoritas dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan strategi peningkatan literasi keuangan ke depan.

“Hal ini (penurunan *gap*) sejalan dengan strategi literasi keuangan yang dijalankan oleh OJK, yaitu meningkatkan kuantitas literasi keuangan di wilayah perdesaan,” kata Friderica yang akrab disapa Kiki itu.

Temuan ini juga membuka ruang para pelaku industri keuangan membuat pendekatan baru yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor keuangan. Tentu pada

akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan untuk ke depan, fokus OJK adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia yang rancangan kerjanya sudah tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 yaitu Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga terkait, perangkat desa dan penggerak PKK Desa, hingga mahasiswa KKN.

Strategi tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat di wilayah perdesaan sehingga *gap* literasi keuangan masyarakat perkotaan dan perdesaan semakin menyempit. ●



Tantangan Menghidupkan Denyut *Fintech*

Me
Meski telah menembus 85,10% secara nasional, indeks inklusi keuangan di Indonesia masih membuka ruang pekerjaan rumah pada sejumlah sektor jasa keuangan. Temuan pada SNLIK Tahun 2022 jika dibedah lebih lanjut menemukan sisi inklusi keuangan yang masih berada di bawah 10%.

Industri dana pensiun dan pergadaian merupakan sektor jasa keuangan yang mengalami penurunan dibandingkan survei terakhir, tepatnya masing-masing dari 6,18% jadi 5,42% dan 12,38% jadi 11,88%.

Penurunan inklusi di sektor dana pensiun tidak bisa dilepaskan dari faktor turunnya jumlah pengelola dana pensiun. Per September 2022, jumlah pelaku dana pensiun turun dari 212 menjadi 198 secara *year-on-year* (yoy).

Tantangan lain yang tidak bisa disepelekan adalah perihal inklusi pada sektor-sektor yang masih membukukan indeks *single digit*. Seperti pasar modal (5,19%), lembaga keuangan mikro (5,53%), hingga yang paling rendah yaitu produk perusahaan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology* (*fintech*).

Tentu hasil survei ini menjadi hasil pengukuran yang nyata. Meski pandemi Covid-19 diyakini memacu laju ekonomi digital dalam negeri, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia dalam sektor *fintech* masih amat rendah. Tepatnya 2,56%, sekaligus menjadikan inklusi pada sektor tersebut yang paling rendah di antara semua industri jasa keuangan.

Atas temuan ini, OJK tidak tinggal diam. Untuk memastikan posisi *fintech* sebagai pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi digital Tanah Air, berbagai strategi telah disiapkan.

“Di sisi *supply*, saat ini OJK berkolaborasi dengan seluruh elemen ekosistem keuangan digital tengah mempersiapkan infrastruktur,” ujar Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Triyono.

Beberapa contoh infrastruktur yang dimaksud seperti elektronik *Know Your Customer* (e-KYC), tanda tangan elektronik, digital ID, serta perangkat keamanan siber. Persiapan ini diyakini Triyono bakal membuat tata kelola dan tingkat keamanan dalam bertransaksi melalui layanan dan produk digital, termasuk produk-produk pelaku

fintech meningkat. Dengan peningkatan itu, inklusi masyarakat juga ditarget terus naik.

Kemudian, pada sisi *demand* atau permintaan, OJK juga menyiapkan berbagai program. Dari mulai edukasi hingga penyusunan modul maupun materi keuangan digital sebagai sarana pembelajaran masyarakat. Namun, khususnya pada sisi *demand* ini, OJK juga berharap upaya tidak kalah keras turut dilakukan para pelaku *fintech*.

Sejauh ini, para pelaku industri *fintech* pun menyambut ekspektasi tersebut dengan komitmen. Dengan dukungan regulator dan potensi besar yang dimiliki Indonesia, *fintech* optimistis bisa menjadi jembatan bagi masyarakat yang membutuhkan kemudahan layanan finansial.

“Industri *fintech lending* terbukti dapat memberikan kemudahan layanan finansial di tengah masih banyaknya masyarakat Indonesia yang masuk ke dalam kategori *unbanked*,” ujar Ketua Umum Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Adrian Gunadi.

Sejauh ini *fintech* terus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian. Pada segmen pendanaan contohnya, hingga September 2022 Industri ini telah mencatatkan agregat penyaluran pendanaan mencapai Rp455 triliun yang disalurkan oleh 960.396 pemberi pinjaman kepada 90,21 juta penerima.

“Ini adalah bukti nyata kontribusi *fintech lending* dalam pemerataan inklusi keuangan di Indonesia,” imbuh Adrian.

Maka, dengan besarnya upaya yang terus dilakukan regulator dan berbagai *stakeholder* untuk memacu denyut inklusi keuangan pada sektor *fintech*, kontribusi lebih besar dalam beberapa tahun mendatang jelas bukan sesuatu yang mustahil. ●





Pertumbuhan Literasi dan Inklusi Keuangan Semakin Merata

Kenaikan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, yang tercermin dari hasil SNLIK tahun 2022, juga beriring dengan pemerataan. Terbukti, indeks literasi dan inklusi keuangan yang tinggi bukan hanya dibukukan oleh responden-responden dari provinsi besar Pulau Jawa.

Dalam hal inklusi keuangan, misalnya, terdapat 19 provinsi yang membukukan indeks inklusi keuangan di atas rata-rata nasional yang sebesar 85,10%. Dari 19 provinsi tersebut, 14 di antaranya merupakan

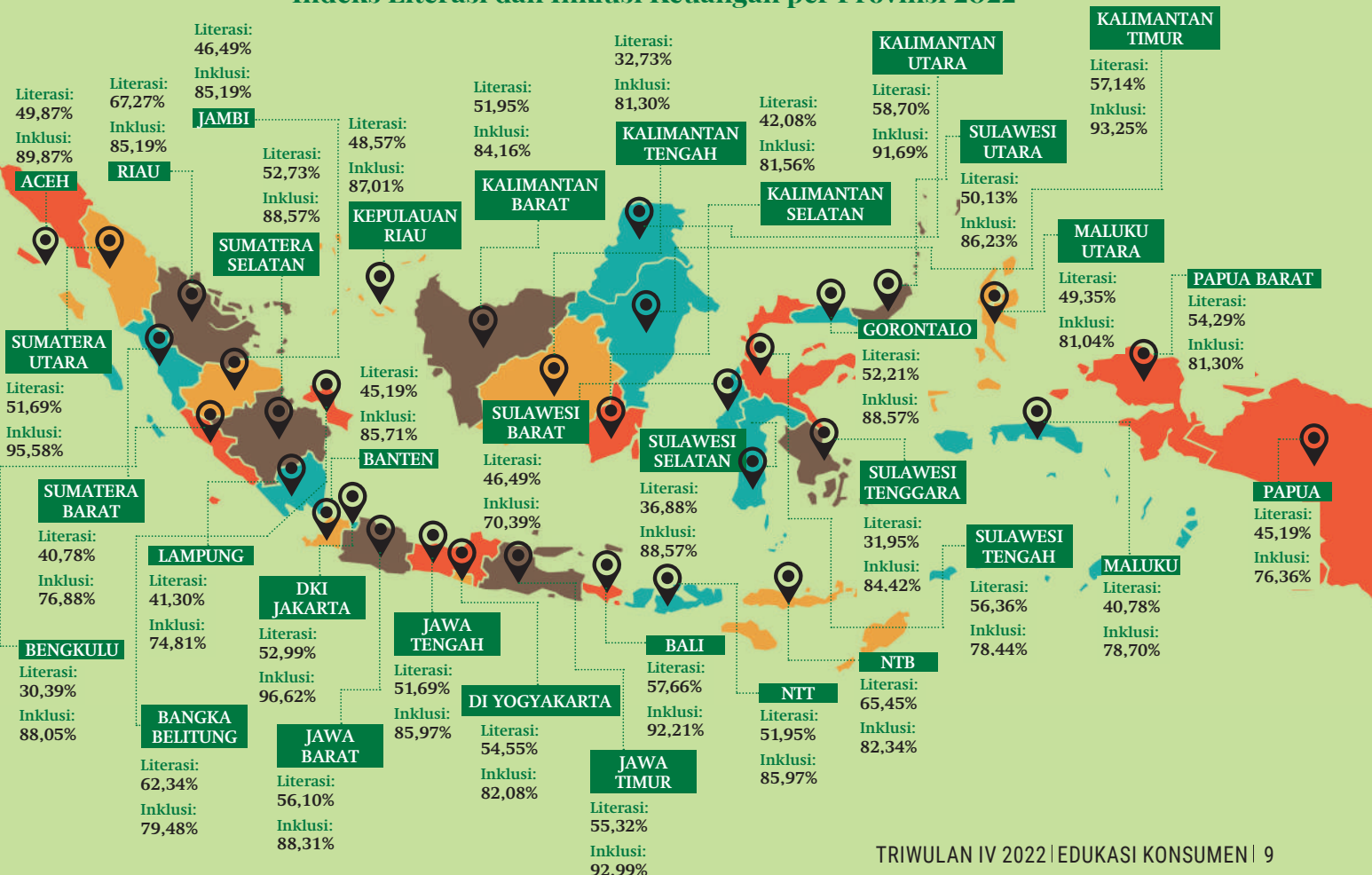
provinsi yang terletak di luar Pulau Jawa. Terdapat 6 provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan di atas 90%. Walau DKI Jakarta (96,62%) masih menjadi provinsi dengan inklusi keuangan tertinggi, namun dalam posisi 6 teratas mayoritas (4 provinsi) di antaranya justru berasal dari luar Jawa. Masing-masing adalah Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Kondisi serupa tampak pada sisi literasi keuangan. Berdasarkan survei, terdapat 20 provinsi yang memiliki literasi keuangan di atas rata-rata 49,68% secara nasional.

Meski hampir seluruh provinsi di Jawa kecuali Banten masuk dalam daftar ini, banyaknya perwakilan provinsi dari luar Jawa juga mengindikasikan bahwa peningkatan literasi keuangan nasional pun terjadi secara merata.

Bahkan, bila mau bicara lebih spesifik lagi, 6 provinsi di Indonesia yang memiliki literasi keuangan tertinggi seluruhnya adalah provinsi luar Pulau Jawa. Mereka adalah Riau (67,27%), NTB (65,45%), Bangka Belitung (62,34%), Kalimantan Utara (58,7%), Bali (57,66%), dan Kalimantan Timur (57,14%). ●

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan per Provinsi 2022





Kesepakatan di KTT G20 Bali untuk Dunia

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan rangkaian pertemuan G20 pada 2022 berhasil membuahkan kesepakatan bersama Deklarasi Pemimpin G20 atau G20 Bali *Leaders' Declaration*.

Dalam *Leaders' Declaration* yang disahkan pada penutupan KTT G20 yang diselenggarakan di Bali, pada 15 dan 16 November 2022 lalu, terdapat 52 poin kesepakatan yang terkait berbagai aspek, mulai dari ekonomi, geopolitik, ketahanan pangan, hingga transisi energi.

Kesepakatan ini juga merupakan rangkuman dari 24 dokumen komunikasi, rekomendasi, dan masukan hasil pembahasan dari kelompok kerja dan pertemuan tingkat menteri. Sepanjang 2022, telah diadakan 437 pertemuan di berbagai tingkat di bawah Presidensi G20 Indonesia.

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali *Leaders' Declarations*, ini merupakan deklarasi pertama yang bisa diwujudkan sejak Februari 2022," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menutup KTT G20 di Bali.

Lahirnya *Leaders' Declaration* di tengah gejolak geopolitik, krisis pangan dan energi, hingga krisis ekonomi dalam kepemimpinan Indonesia di G20 setahun terakhir menuai apresiasi, baik dari pemimpin negara maupun lembaga internasional.

Pada poin pertama *Leaders' Declaration*, dinyatakan komitmen bahwa G20

akan selalu menjadi forum kerja sama ekonomi global sejak para pemimpin G20 bertemu untuk pertama kalinya pada 14 tahun lalu. Sebagai ekonomi global yang besar, negara G20 memikul tanggung jawab dan bekerja sama untuk pemulihan ekonomi global, mengatasi tantangan global, dan meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Poin kedua berisikan pandangan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan tantangan lainnya termasuk perubahan iklim, yang menyebabkan kemerosotan ekonomi, peningkatan kemiskinan, memperlambat pemulihan global, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Pada poin ketiga, para pemimpin negara G20 menyatakan sikap





atas perang Rusia dan Ukraina. Mayoritas anggota G20 meyakini keras perang di Ukraina dan menekankan bahwa hal itu telah menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerapuhan yang ada dalam ekonomi global, menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai pasokan, meningkatkan kerawanan energi dan pangan, dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan.

Selanjutnya, G20 menyepakati pembentukan dana pandemi atau *Pandemic Fund*, yang merupakan dana kelolaan untuk pencegahan dan persiapan jika kembali terjadi pandemi di masa depan. Pada tahap awal sembilan negara anggota G20 yang sudah menyumbangkan dana ke *Pandemic Fund*. Selain itu, terdapat empat negara anggota yang telah menyatakan komitmen akan turut berkontribusi pada program tersebut.

Tercatat, dana lebih dari US\$1,5 miliar sudah terkumpul, dari 21 negara dan tiga lembaga filantropi. Sasaran penyaluran utama dana ini adalah untuk negara miskin dan berkembang.

G20 menyepakati pembentukan dana pandemi atau *Pandemic Fund*, yang merupakan dana kelolaan untuk pencegahan dan persiapan jika kembali terjadi pandemi di masa depan.

Selanjutnya, anggota G20 sepakat mendukung upaya internasional untuk menjaga agar rantai pasokan makanan tetap berfungsi dalam keadaan yang menantang, dengan memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, serta keberlanjutan pangan dan produk pangan bagi yang membutuhkan, terutama negara berkembang dan negara kurang berkembang.

Negara anggota G20 juga sepakat untuk mengatasi krisis energi dunia, mendorong dan mendiversifikasi sistem energi dengan cepat, memajukan keamanan dan ketahanan energi, serta stabilitas pasar, dengan mempercepat dan memastikan transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan inklusif, serta aliran investasi berkelanjutan.

Dengan *Bali Compact and the Bali Energy Transition Roadmap*, negara G20 berkomitmen untuk menemukan solusi guna mencapai stabilitas, transparansi, dan keterjangkauan pasar energi. Negara maju juga didesak untuk memobilisasi dana US\$100 miliar per tahun hingga 2025 untuk mendukung transisi energi negara berkembang.

Pada bidang transformasi digital, negara anggota sepakat untuk memajukan transformasi digital yang lebih inklusif, berpusat pada manusia, memberdayakan, dan berkelanjutan. Negara G20 menegaskan kembali peran data untuk pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, negara G20 juga mendukung implementasi yang berkelanjutan dari *G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments*. Bank sentral, bersama dengan otoritas lainnya, dan industri pembayaran didorong untuk terus bekerja sama dalam inisiatif penting ini dalam meningkatkan pembayaran lintas batas.

Untuk mendukung ambisi pulih bersama, pulih lebih kuat, negara G20 berkomitmen menerapkan kebijakan yang terkalibrasi dengan baik, terencana dengan baik, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan berkelanjutan. Kebijakan fiskal akan diarahkan tetap fleksibel, siap menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah sesuai kebutuhan.

Kerjasama kebijakan makro, menjaga stabilitas keuangan, dan kesinambungan fiskal untuk jangka panjang, serta melindungi dari risiko penurunan dan dampak negatif, akan terus ditingkatkan. Kebijakan makroprudensial juga tetap diarahkan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko sistemik seiring dengan kondisi keuangan yang semakin ketat.

Di bidang perpajakan, negara G20 berkomitmen untuk segera menerapkan dua pilar paket pajak internasional OECD/G20. Negara G20 menyambut kemajuan di Pilar Satu dan Pilar Dua *Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules*, dan menantikan penyelesaian Kerangka Implementasi GloBE.

Di samping itu, negara G20 menyepakati dukungan ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan *Resilience and Sustainability Trust (RST)* dengan dana yang terkumpul sebesar US\$81,6 miliar.

Lalu, terdapat langkah penanganan krisis utang negara miskin dan berkembang melalui *Common Framework for Debt Treatment*. Selain itu, Indonesia juga mendorong pembahasan terkait dengan penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin, yang melonjak signifikan selama pandemi Covid-19. ●



Finance Track

6 Agenda Prioritas Indonesia dalam Kepemimpinan G20

Presidensi Indonesia di G20

mengusung enam agenda prioritas pada jalur keuangan atau *finance track*. Targetnya pemerataan ekonomi bagi negara berkembang dan pemulihan ekonomi global.

Lebih detail, enam agenda yang diusung Indonesia dalam presidensi G20 di antaranya *exit strategy* untuk mendukung pemulihan ekonomi global, mengatasi dampak pandemi Covid-19 atau *scarring effect* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, perpajakan internasional, dan inklusi keuangan.

Pada pertemuan penutup *finance track*, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan aksi konkret dan berdampak yang dituangkan dalam simpulan *Finance Ministers and Central Bank Governor (FMCBG) G20*.

Pertemuan keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral itu diselenggarakan pada 12–13 Oktober 2022, bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group) 2022. Sri Mulyani menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinan di G20,

Indonesia telah bersungguh-sungguh untuk mengupayakan diskusi di setiap pertemuan berjalan lancar.

“Kami perlu menghasilkan aksi konkret dengan menunjukkan semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus. Secara historis, G20 telah mencatatkan kemampuan kami untuk melalui (memimpin presidensi) ini semua,” katanya.

G20 menyatakan akan terus mendukung alokasi penyaluran *Special Drawing Right (SDR)* untuk membantu golongan yang paling rentan serta meningkatkan kapasitas sumber daya *Multilateral Development Banks* melalui tinjauan Kerangka Kecukupan Modal, dan di saat yang sama memastikan penerapan *Common Framework* pada *Debt Treatment* di luar DSSI.

G20 juga menyambut baik diskusi lanjutan tentang sistem pembayaran yang saling terkait dan opsi akses dan interoperabilitas *Central Bank Digital Currency (CBDC)* untuk pembayaran lintas batas.

Sebagai wujud implementasi regional dari Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara, bank sentral Asean-5 telah menandatangani Nota Kesepahaman menghubungkan sistem pembayaran, diantaranya Bank Indonesia, Bank Negara

Malaysia (BNM), Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan kerja sama antara kelima negara Asean ini akan menjadi batu loncatan untuk membuka jalan bagi konektivitas pembayaran lintas batas yang lebih kuat dan maju.

“Kerja sama bilateral yang telah terjalin selama ini akan diperluas melalui kerja sama konektivitas pembayaran kawasan sebagai upaya untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan. Kolaborasi ini juga menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” katanya.

Sri Mulyani menambahkan, Indonesia kembali menegaskan bahwa pertemuan negara dengan ekonomi terbesar di dunia dalam G20 telah mampu menjadi forum utama untuk kerja sama internasional yang berhasil mengatasi krisis yang ada dan melanjutkan usaha untuk mengantisipasi krisis lebih lanjut.

“Presidensi G20 Indonesia telah mempertahankan integritas G20 dengan menghasilkan tindakan nyata dalam mendukung ekonomi dunia untuk dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat”. ●



CMSE 2022

Mendorong Edukasi Saat Semakin Ramainya Investor dan Emiten Baru

Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2022 menjadi langkah peningkatan literasi pasar modal di tengah rangkaian peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dalam acara yang diselenggarakan oleh OJK bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) digelar

9 sesi seminar secara *online* serta pameran 135 *digital booth*, yang berlangsung pada 13-15 Oktober 2022.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi mengatakan pertumbuhan pasar modal Indonesia masih positif, dengan volatilitas yang relatif terjaga hingga saat ini dibandingkan dengan negara lain.

“Kinerja IHSG merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan bursa Asia dan regional,” kata Inarno.

Dia menekankan pertumbuhan pasar modal Tanah Air sangat penting dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai tempat berinvestasi yang aman, nyaman, dan terpercaya. Hal ini khususnya dalam mendukung penyediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan, baik bagi proyek prioritas pemerintah maupun untuk meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia ke kancah global,” ujarnya.

Di samping itu, emiten juga mulai meningkatkan penghimpunan dana melalui pasar modal seiring dengan telah pulihnya kembali aktivitas perekonomian domestik. Hingga akhir Desember 2022, aktivitas penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp267,73 triliun. Terdapat 71 emiten baru.

Pertumbuhan jumlah emiten diikuti oleh lonjakan investor ritel yang meningkat hampir 9 kali lipat dibandingkan 5 tahun terakhir. OJK mencatat, sepanjang 2022, jumlah investor pasar modal mencapai 10,31 juta SID. ●





World Investor Week 2022 Mendorong Peningkatan Kualitas Investor

Edukasi di Pasar Modal terus didorong oleh OJK. Langkah ini termasuk dengan menyemarakkan World Investor Week 2022 yang digagas oleh International Organization of Securities Commission (IOSCO). Kegiatan ini mulai dari edukasi melalui media *talkshow* radio, Instagram *Live*, webinar, dan lainnya sepanjang bulan Oktober dan November 2022.

OJK bersama dengan *Self Regulatory Organization* (SRO) dan PUJK menyelenggarakan sebanyak 212 kegiatan. Diantaranya adalah 119 kegiatan edukasi pasar modal, 24 Instagram *Live*, 77 *talkshow* radio, 2 *social media challenges*, yang seluruhnya mencapai lebih dari 8 juta partisipan. Selain itu terdapat pula publikasi materi terkait pasar modal baik konvensional maupun syariah.

Sarjito, Deputy Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, menuturkan, jumlah investor di Tanah Air melonjak dengan signifikan. Terutama setelah terjadinya pandemi Covid-19. Jumlah investor pasar modal yang baru 2,4 juta pada akhir 2019, telah melonjak menjadi 9,7 juta investor pada September 2022.

“Data demografis investor menunjukkan bahwa saat ini memang demikian didominasi oleh laki-laki sebesar 62,73% dan perempuan sebesar 37,27%. Sedangkan berdasarkan usia, jumlah investor terbesar berasal dari generasi milenial di bawah usia 30 tahun sebesar 59,08%,” jelasnya

Sementara itu masih dalam rangkaian World Investor Week 2022, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey

Hendrik, menuturkan fenomena melonjaknya jumlah investor ini.

“Masyarakat semakin menyadari pentingnya punya investasi sebagai alternatif dana darurat sekaligus meningkatkan aset,” jelasnya.

Dalam ketidakpastian ekonomi, seperti tingginya inflasi, Jeffrey menyebutkan peran investasi semakin penting, karena jika hanya mengandalkan tabungan, nilai aset bisa tergerus peningkatan inflasi. Oleh karena itu, investor perlu melakukan investasi dengan *return* yang lebih tinggi dari inflasi.

Ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan investor dalam mengelola nilai asetnya. *Pertama*, alokasikan dana investasi di luar kebutuhan sehari-hari. Dana awal tidak harus besar, misalnya 10%-20% dari pendapatan bulanan untuk investasi.

Kedua, melakukan investasi secara bertahap. Jadi, setiap bulan investor bisa menambah alokasi investasinya ataupun menambah portofolio investasi baru. Kegiatan investasi dilakukan secara rutin sambil terus melakukan analisis.

Ketiga, jangan mudah terpengaruh, karena naik turunnya harga aset seperti saham seringkali disebabkan faktor non fundamental. Investor tentunya tetap disiplin dengan rencana investasinya.

Keempat, melakukan diversifikasi aset untuk mengelola risiko investasi, misalnya setelah investasi saham, dapat melanjutkan investasi ke SBN ritel yang lebih aman. *Kelima*, pantau perkembangan fundamental, misalnya kinerja perusahaan yang sahamnya dimiliki, dan melihat faktor makro ekonomi secara umum. ●





oleh orang yang menawarkan produk keuangan, dan mereka suka bingung, tahu dari mana datanya, jadi ada kesan data tidak dilindungi,” ujarnya.

Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) tahun 2020, estimasi total kerugian rata-rata tahunan yang dialami sektor jasa keuangan secara global yang disebabkan oleh serangan siber, termasuk penyalahgunaan data pribadi yaitu senilai US\$100 miliar atau lebih dari Rp1.433 triliun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Pandu Sjahrir mengatakan, di sektor *fintech*, asosiasi telah bekerja sama dengan pelaku usaha untuk mendalami UU Perlindungan Data Pribadi tersebut.

“Kami merasa [UU Perlindungan Data Pribadi] sangat penting, kalau tanpa landasan hukum kami di industri susah berkembang lebih cepat lagi,” ungkapnya.

Secara terperinci, sistematika dari UU tentang PDP terdiri dari Bab I Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi, Bab 4 Hak Subjek Data Pribadi, Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi.

Selanjutnya, Bab 6 Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 Transfer Data Pribadi, Bab 8 Sanksi Administratif, dan Bab 9 Kelembagaan.

Kemudian diikuti dengan Bab 10 Kerja Sama Internasional, Bab 11 Partisipasi Masyarakat, Bab 12 Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan, dan Bab 16 Ketentuan Penutup. ●

Setelah Undang-Undang Data Pribadi Disahkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022. Sesuai dengan judul, peraturan ini bertujuan melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) atau mencegah penyalahgunaan dari individu tak bertanggung jawab.

Pasal 68 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa ada ketentuan pidana bagi masyarakat yang terbukti membuat data pribadi palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dengan penerapan ini, OJK memastikan lembaga jasa keuangan akan mematuhi Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Dewan Komisaris OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widayarsi

Dewi, mengatakan otoritas telah melakukan diskusi secara internal terkait adanya regulasi terbaru ini.

“Kami minta seluruh pengawas [industri keuangan] agar bagaimana memastikan setiap pelaku industri patuhi UU Perlindungan Data Pribadi Ini. Kami bantu dari sisi aturannya, baik itu industri perbankan seperti apa, asuransi seperti apa, *fintech* seperti apa,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki ini dalam konferensi pers OJK Virtual Innovation Day bertajuk ‘*Building Trust in Digital Financial Ecosystem*’ di Jakarta, pertengahan Oktober 2022 lalu.

Dia mengatakan, OJK akan terus melakukan koordinasi karena UU Perlindungan Data Pribadi mengatur terkait perlindungan konsumen. “Ini yang setiap hari kami sentuh, melakukan tugas perlindungan konsumen,” ujarnya.

Apalagi, sektor keuangan menurutnya rentan terhadap upaya penyalahgunaan data pribadi. “Setiap hari masyarakat ditelepon



Memastikan Keamanan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Di era ekonomi digital, penggunaan tanda tangan elektronik menjadi semakin jamak. Namun demikian, keamanan dan aspek legalitasnya tetap harus menjadi prioritas utama.

Penggunaan tanda tangan elektronik telah lama dilegalisasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan PP No. 71 tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Seiring dengan itu, keabsahan transaksi ekonomi digital dan tanda tangan elektronik (TTE) juga telah diakui setara dengan transaksi fisik dan tanda tangan basah.

Tony, Deputi Direktur Basel & Perbankan Internasional, Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan OJK mengatakan tanda tangan elektronik sangat penting dalam era keuangan digital. Meski demikian, *Know Your Customer* (KYC) menjadi kunci agar penggunaan tanda tangan digital dapat terimplementasi dengan baik dan memastikan keamanan transaksi digital.

“Sebagai tanda tangan yang sudah diakui secara hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), maka tentunya itu [tanda tangan digital] dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan juga, dimana sektor keuangan pun digitalisasi juga semakin marak,” kata Tony beberapa waktu lalu.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan dalam pengembangan ke arah transaksi ekonomi digital dibutuhkan inovasi perangkat, aturan dan provider untuk memverifikasi identitas digital nasabah di dunia perbankan.

Semuel menyatakan sertifikasi terhadap pemilik nasabah dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang memverifikasi dan menerbitkan sertifikat elektronik supaya pengguna dapat menggunakannya untuk tanda tangan elektronik dan identitas digital.

“Kita sudah ada penyelenggaranya, karena pertumbuhan transaksi digital sangat besar dan cepat,” ujar Samuel dalam diskusi daring ‘Manfaat Identitas Digital dan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi di Indonesia’.

Semuel menjamin keamanan tanda tangan elektronik dan identitas digital bagi setiap nasabah. Karena itu, dia berharap, ke depan, masyarakat semakin banyak beraktivitas di ruang digital agar lebih efektif dan tercatat.

CEO dan Co-Founder VIDA (Verified Identity for All) Sati Rasuanto menggambarkan, bila di dunia fisik, kepercayaan nasabah terhadap kesahihan lembaga perbankan ditandai dengan melihat nama bank itu, gedung, serta perangkat



pegawai untuk mengetahui bank itu sah atau terpercaya.

“Maka, di dunia digital pun, kepercayaan nasabah terhadap kelengkapan perangkat bank itu tetap terjadi. Kepercayaan nasabah itu didapatkan dalam bank digital dengan kelengkapan proses verifikasi,” ujarnya.

Verifikasi melingkupi data demografi, memeriksa langsung ke sumber data Ditjen Dukcapil Kemendagri sehingga data demografi tervalidasi. Verifikasi juga dilakukan dengan mencocokkan kesesuaian wajah pengguna dengan data yang sudah ada.

“Lalu, pengecekan ketiga adalah teknologi yang kami sebut *liveness detection* saat validasi dan verifikasi proses *selfie*/swafoto yang dilakukan. Proses yang kami lakukan ini menjamin keamanan,” ujarnya.

Patut diingat bahwa tanda tangan yang diterbitkan PSrE hanya dapat dimiliki dan digunakan oleh pengguna yang identitasnya telah diverifikasi oleh PSrE penerbit. Tanda tangan tersebut juga tidak dapat dialihkan atau digunakan oleh orang lain karena dibutuhkan otentikasi dalam penggunaannya. ●



Lebih Nyaman dengan Asuransi Kredit

Perbincangan akan asuransi kredit meningkat di tengah masyarakat. Pasalnya, produk asuransi kredit menjadi satu kesatuan dalam program restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19 yang telah digulirkan 2 tahun terakhir.

Asuransi kredit memegang peran penting sebagai penyangga sistem keuangan agar tidak rubuh. Pasalnya, dengan asuransi kredit, segala risiko yang timbul bagi nasabah perusahaan pembiayaan maupun perbankan akan beralih ke perusahaan asuransi. Baik risiko akibat debitur meninggal dunia, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan kebangkrutan.

Bentuk pertanggungansian asuransi kredit bukan memberi santunan kepada nasabah yang terdampak. Akan tetapi berfungsi untuk menyelesaikan kewajiban atau utang terhadap lembaga pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono, menuturkan secara agregat asuransi kredit dan klaim yang timbul masih terkendali. Meski demikian, sejumlah perusahaan asuransi telah melakukan pembicaraan ulang secara *business to business* untuk mendukung bisnis asuransi kredit tetap berjalan.

“Secara agregat [klaim produk asuransi kredit meski ada

restrukturisasi akibat pandemi Covid-19] masih terkendali secara keseluruhan,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisiner (RDK) Bulanan yang digelar awal Desember 2022.

Secara lebih detail manfaat asuransi kredit ini meliputi pelunasan sisa pinjaman sehingga nasabah tidak memiliki tunggakan di bank. Lainnya, bentuk penggunaan asuransi kredit berupa pelunasan sisa bunga ditambah tunggakan, ataupun pembayaran bunga untuk periode 3 bulan.

Asuransi kredit sendiri mencakup beragam produk perbankan seperti Asuransi Kredit Konsumtif. Umumnya, penjaminan asuransi





Produk asuransi kredit juga menjamin pinjaman produktif baik ke korporasi maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perlindungan yang diberikan umumnya jika debitur gagal bayar akibat kegagalan usaha.



kredit konsumtif melindungi nasabah individu. Perjanjian yang mengikat lembaga pembiayaan dengan perusahaan asuransi seperti asuransi jiwa kredit yang diberikan ketika debitur meninggal atau asuransi kredit PHK.

Produk asuransi kredit juga menjamin pinjaman produktif baik ke korporasi maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perlindungan yang diberikan umumnya jika debitur gagal bayar akibat kegagalan usaha.

Dengan besaran risiko yang ditanggung perusahaan asuransi dalam asuransi kredit ini, maka besaran premi yang ditanggung debitur mencakup banyaknya utang yang disetujui, usia debitur hingga panjang tenor pinjaman yang disetujui.

Untuk itu, memilih asuransi kredit agar dapat memaksimalkan

pertanggungans harus memperhatikan sejumlah hal, misalnya (1) surat penawaran berasal dari perusahaan memastikan agen yang bersertifikat Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang tersertifikasi, (2) memastikan data di SPPA telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, (3) membaca kontrak/polis secara seksama, (4) meminta perubahan jika terdapat kesalahan data dalam polis yang diberikan.

Tentu dengan adanya asuransi kredit bukan berarti nasabah dapat melakukan *fraud* dengan menghindari kewajiban sehingga gagal bayar. Dalam pemberian kredit, perusahaan pembiayaan perbankan, modal ventura, bahkan *financial technology (fintech)* harus mematuhi ketentuan prinsip pemberian kredit yang *prudent* dan memenuhi ketentuan *Know Your Customer Principles (KYCP)*. ●



Tingkatkan Literasi Keuangan dengan Mudah dan Gratis Lewat LMS Edukasi Keuangan



Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat perihal pasar keuangan, OJK telah menyediakan platform *Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan*, yang dapat diakses melalui tautan lmsku.ojk.go.id.

Di dalam platform yang dapat diakses secara gratis tersebut, materi yang disediakan terus ditingkatkan. Terbaru, dalam menyambut Bulan Inklusi Keuangan 2022. Saat ini LMS Edukasi Keuangan telah memiliki modul *basic* dan *intermediate*.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Hubungan Masyarakat, Kristrianti Puji Rahayu, menyampaikan percepatan literasi keuangan terus ditingkatkan oleh regulator. Hingga akhir November saja, pihaknya telah mencatatkan lebih dari 1.000 program edukasi keuangan telah diselenggarakan. Baik secara *online*, *offline*, maupun *hybrid*. Termasuk dengan LMS.

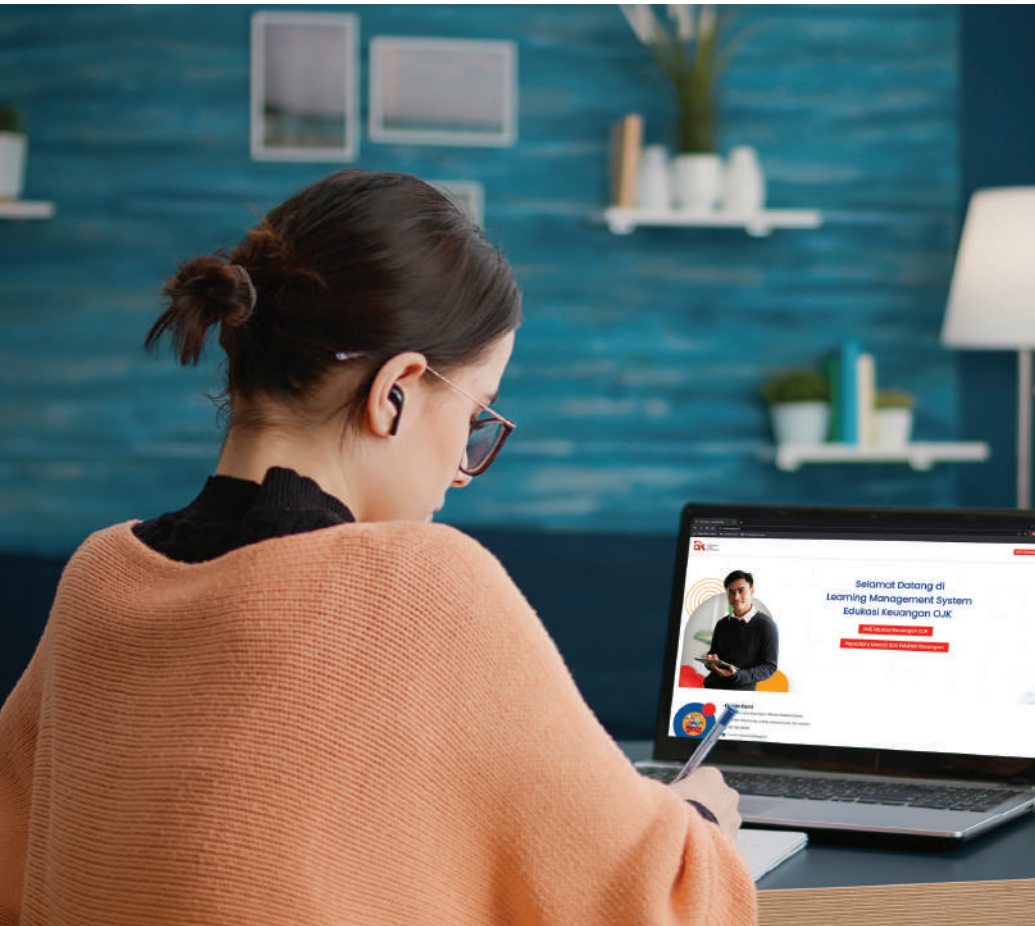
“Di Bulan Inklusi Keuangan juga diluncurkan modul pembelajaran LMS mengenai keuangan syariah level *basic* dan *intermediate*, dengan strategi edukasi *online* dan *offline* sehingga nanti pesantren dan universitas Islam juga bisa mengakses LMS kami,” ucapnya.

Dalam LMS, sejumlah modul pembelajaran tersedia baik untuk perbankan, pengenalan OJK dan waspada investasi, perencanaan keuangan, pasar modal, pergadaian, dan perusahaan pembiayaan.

Selanjutnya ada modul asuransi, dana pensiun, *fintech*, *digital*



<https://lmsku.ojk.go.id/>



financial literacy, dan keuangan syariah. Setiap tautan modul diawali dengan video edukasi mengenai materi dalam modul. Misalnya, dalam modul perbankan, edukasi diawali dengan video edukasi keuangan di sektor perbankan.

Setelah menonton video materi awal, peserta dapat mengakses sejumlah materi lainnya dalam bentuk video interaktif. Informasi yang ditampilkan mudah dimengerti meski topik yang dibahas terbilang spesifik.

Dalam modul pasar modal misalnya, peserta mendapatkan materi kursus pengenalan pasar modal, manfaat dan risiko pasar modal, pengenalan saham, karakteristik saham, hingga pengenalan produk pasar modal

lainnya, seperti reksa dana, obligasi, dan *securities crowdfunding* (SCF).

Selain itu, ada juga materi mengenai hak dan kewajiban konsumen, cara mulai investasi di pasar modal, dan biaya investasi di pasar modal. Jadi, bisa dikatakan informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan peserta, khususnya yang ingin belajar pengetahuan pasar modal.

Di akhir materi, peserta dapat melakukan tes untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap satu modul materi. Uniknya, peserta bisa mengunduh sertifikat dari OJK dan mengumpulkan poin untuk ditukarkan hadiah menarik. Hal ini tentunya menjadi apresiasi tersendiri bagi peserta yang sudah melakukan pembelajaran dari modul awal hingga tahap tes terakhir. ●



Dalam modul pasar modal misalnya, peserta mendapatkan materi kursus pengenalan pasar modal, manfaat dan risiko pasar modal, pengenalan saham, karakteristik saham, hingga pengenalan produk pasar modal lainnya, seperti reksa dana, obligasi, dan securities crowdfunding (SCF).



Akses Masyarakat ke Produk Keuangan Syariah Meningkatkan

Indeks literasi dan inklusi keuangan di industri keuangan syariah pada periode 2022 mengalami peningkatan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, literasi keuangan syariah untuk masyarakat Indonesia meningkat dari 8,93% pada 2019 menjadi 9,14% dalam survei terbaru. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah juga menunjukkan peningkatan menjadi 12,12% dari sebelumnya pada level 9,10% dalam periode survei sebelumnya.

Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan Aceh menjadi salah satu wilayah yang mendominasi hasil SNLIK 2022, baik untuk tingkat literasi maupun inklusi keuangan syariah.

Secara rinci, Friderica menyampaikan untuk literasi syariah daerah-daerah yang berada di atas indeks literasi syariah nasional terdiri dari Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sementara itu, untuk inklusi keuangan daerah yang berada di atas indeks inklusi keuangan

nasional di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Friderica yang akrab disapa Kiki ini menjelaskan, peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah ini patut disyukuri. Meski demikian, menjadi perhatian serius bagi OJK dan pemangku kepentingan bahwa pertumbuhannya belum masif.

“Kalau dilihat angkanya, ini kemungkinan karena surveinya dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, sementara untuk wilayah tertentu memang tidak mementingkan isu-isu syariah. Daerah-daerah tertentu itu masyarakat memang tidak syariah, tetapi karena itu tetap disurvei, jadi kemungkinan itu menyebabkan angkanya kecil. kata Kiki dalam konferensi pers hasil SNLIK 2022 akhir November lalu.

Dia juga menekankan peningkatan indeks literasi dan keuangan syariah bagian dari inisiasi yang dilakukan

OJK dengan melibatkan berbagai pihak. Sejumlah program-program khusus dengan mengusung tema syariah dalam industri keuangan.

Di pasar modal misalnya, telah tersedia produk berbasis syariah baik dalam bentuk surat utang yang lebih dikenal dengan sebutan Sukuk, daftar saham syariah hingga reksa dana syariah. Edukasi terhadap komunitas pasar modal yang mendahulukan prinsip syariah juga dilakukan dengan gencar.

Di samping itu, OJK juga memiliki program-program yang menitikberatkan kepada komunitas syariah, seperti program khusus untuk santri dalam rangka Hari Santri pada 22 Oktober 2022. Ada pula, program olimpiade cerdas cermat keuangan syariah yang telah diikuti oleh 500 sekolah di wilayah Indonesia.

OJK mengeluarkan modul pembelajaran edukasi keuangan syariah berupa modul *Learning Management System (LMS)* tingkat *basic* dan *intermediate*. Modul ini terdiri dari pengenalan keuangan syariah, fikih muamalah, konsep uang dalam syariah, hingga dana sosial keuangan syariah.

“Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik antara OJK, kementerian/lembaga terkait, industri, jasa keuangan dan berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah dewan nasional keuangan inklusif maupun tim percepatan akses keuangan daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” untkapnya. ●





Edukasi Keuangan Menggema di Hari Santri 2022

Peningkatan literasi keuangan syariah dilakukan dalam semua kesempatan oleh OJK, tidak ketinggalan dalam perayaan Hari Santri Nasional tahun 2022. Dengan mengusung tema Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (Sakinah), peningkatan literasi dan inklusi dikumandangkan secara serentak di lima pondok pesantren dengan pemusatan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak - Bantul dan diikuti oleh Pondok Pesantren Darunnajah - Jakarta, Pondok Pesantren Mathla'ul Anwar Leuwipanjang - Banten, Pondok Pesantren API Syubbanul Wathon Secang – Magelang, dan Pondok Pesantren Al-Anwar – Bangkalan.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi menuturkan literasi keuangan yang baik merupakan salah satu pemahaman yang harus dimiliki oleh para santri. Menurut sosok yang akrab disapa Kiki ini, literasi keuangan yang baik akan membuka akses (inklusi) pada lembaga jasa keuangan formal dan menghindari perusahaan investasi ilegal atau bodong.

“Pada intinya belajar keuangan itu adalah kemampuan kita untuk dapat mandiri secara keuangan nantinya. Karena sebetulnya ilmu tentang pengelolaan keuangan adalah *essential life skill* atau keterampilan hidup yang sangat penting dibutuhkan oleh kita semua,” kata Friderica.

Di samping itu, pelaksanaan literasi keuangan dalam Perayaan Hari Santri Nasional ini juga diharapkan



dapat memberikan *multiplier effect* kepada lingkungan sekitar, sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan agar tidak terjerumus pada utang yang konsumtif atau penipuan yang berkedok investasi.

Rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional meliputi *Talkshow* Edukasi Keuangan Syariah, *Launching* Gerakan Santri Menabung, dan *Tabligh Akbar/Doa Bersama*. Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan rekening Simpel iB selama periode 22 – 25 Oktober 2022 guna mendukung Gerakan

Santri Menabung dan Bulan Inklusi Keuangan.

Puncak dan Acara Penutupan Hari Santri Nasional diselenggarakan pada 28 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma'ruf Amin dengan agenda Penyerahan Simbolis Rekening Tabungan Santri, dan Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara OJK dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Acara ini semakin meriah dengan dihadiri lebih dari 5.000 peserta secara tatap muka di masing-masing pondok pesantren. ●



Data IDEB SLIK Sebagai Alasan Penolakan Kredit



Pada Triwulan 4 2022 layanan kontak 157 menerima pertanyaan konsumen, salah satu pertanyaan yang dilayangkan oleh saudara AB mengenai prosedur permintaan data dari aplikasi permohonan informasi debitur (iDeb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Permohonan data diajukan untuk mengkonfirmasi pernyataan yang diterima dari bank tempat saudara AB mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan informasi dari pihak bank yang disampaikan saudara AB, kredit KUR yang diajukan terkendala dalam riwayat pinjaman. Atas kendala ini, maka pihak bank menolak permohonan KUR saudara AB.

Saudara AB menyebutkan sudah mengajukan permohonan melalui

SLIK untuk melakukan konfirmasi ulang data. Hasilnya, data dari SLIK OJK menunjukkan tidak terdapat riwayat kredit buruk dalam catatan keuangannya.

Untuk mengetahui informasi riwayat pinjaman, masyarakat dapat mengajukan Informasi Debitur (iDeb) melalui SLIK OJK. Fasilitas iDeb SLIK OJK adalah kemudahan yang disediakan regulator kepada masyarakat untuk melihat riwayat catatan pinjaman di dalam lembaga jasa keuangan. Pengecekan SLIK dapat dilakukan melalui aplikasi iDebku. Aplikasi ini merupakan layanan pemberian Informasi Debitur (iDeb) berbasis web yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara daring melalui perangkat komputer maupun ponsel pintar.

Informasi yang dapat diakses masyarakat mulai dari riwayat pinjaman debitur, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, atau informasi lainnya yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima OJK dari Pelapor melalui SLIK. iDebku dapat dimanfaatkan baik debitur perorangan, ahli waris atau keluarga untuk debitur yang telah meninggal dunia, dan debitur badan usaha (UMKM dan lainnya).

Selain melihat catatan pinjaman, data iDeb SLIK juga digunakan perbankan untuk memperhitungkan kewajiban yang dapat ditanggung. Setiap perbankan memiliki kebijakan berbeda, namun umumnya menetapkan total besaran cicilan tidak lebih dari 30% sampai 40% penghasilan bulanan. ●



Atur Keuangan dengan Baik, Hindari Aset Dilelang

Penempatan aset sebagai jaminan dalam kredit memiliki risiko sebagai *second way out* alias alternatif penyelesaian pinjaman. Aset sebagai agunan ditempatkan sebagai pemberi kepastian oleh bank dalam persetujuan kredit. Sebagai jaminan, maka nilai yang ditaksir jadi pinjaman tidak 100% karena bukan merupakan jual beli.

Atas posisi aset sebagai jaminan, maka dalam mengajukan kredit setiap calon debitur harus memberikan data yang jujur tentang kemampuan keuangannya. Demikian juga pihak lembaga keuangan baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan, penyaringan ketat debitur berdasarkan syarat kredit harus terpenuhi sehingga tidak membuat bank dan konsumen kesulitan di kemudian hari.

Layanan Kontak 157 OJK menerima laporan dari saudara CD terkait lelang jaminan. Menurut pelapor, pihaknya keberatan lelang dilakukan oleh salah satu bank. Dia mengakui mempunyai pinjaman dengan agunan sertifikat bangunan. Debitur menyebutkan dirinya mengalami keterlambatan pembayaran dari Maret 2022 sampai saat ini. Atas keterlambatan pembayaran ini, telah terbit surat peringatan lelang.

Dengan kondisi peringatan lelang agunan ini, OJK mendorong dilakukan perencanaan keuangan yang ketat sebelum mengajukan kredit. Sejumlah risiko akan muncul

saat perhitungan kemampuan keuangan tidak tepat.

Risiko yang terjadi *pertama* saat kredit macet adalah cicilan menjadi semakin besar karena bunga dan denda terus bertambah. Risiko *kedua* terdapat nilai buruk dalam riwayat kredit pada Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) menjadi buruk. Hal ini dapat berpengaruh pada reputasi debitur. Dampaknya, di masa yang akan datang pengajuan kredit akan berisiko ditolak.

Sedangkan risiko *ketiga*, agunan yang dijamin dapat disita lembaga keuangan dan jika terpaksa dilelang apabila terjadi wanprestasi atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban. OJK mengingatkan debitur memiliki kewajiban untuk membayar tagihan dan beritikad baik dalam proses pelunasan.

Meski lelang dibenarkan sebagai penyelesaian kredit, debitur juga harus mendapatkan informasi yang cukup sebelum agunannya dilelang. Tahapannya yakni mendapatkan surat peringatan dan pengumuman lelang dari Bank. Bank wajib mengirimkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali dan debitur harus memberikan itikad baik terhadap proses pelunasan.

Apabila tidak terdapat itikad baik, maka agunan akan disita untuk pelunasan. Dalam hal ini bank akan memberikan opsi berupa debitur menjual sendiri agunannya atau melalui mekanisme lelang oleh bank. Proses lelang dilakukan secara terbuka. Adapun mekanismenya mungkin berbeda untuk setiap lembaga sehingga konsumen perlu cermat dalam mempelajari perjanjian pinjaman. ●





Data Layanan dan Kontak OJK

Data Pengaduan Triwulan IV Tahun 2022

Periode 1 Oktober 2022 – 9 Desember 2022

Perbankan menjadi lembaga yang paling banyak diadukan masyarakat kepada OJK pada periode Oktober hingga Desember 2022. Terdapat 1.821 aduan yang diterima.

Aduan itu terutama terkait restrukturisasi kredit, sistem layanan informasi keuangan (SLIK), permasalahan agunan, *fraud* serta perilaku petugas penagihan. Aduan lainnya yang mendominasi berasal dari industri pembiayaan (601 aduan) dan perusahaan pinjaman *online* (616 aduan).

Masyarakat dapat mengadukan kendala maupun masalah terkait lembaga jasa keuangan terdaftar dan berizin di OJK melalui Kontak OJK @kontak157 di nomor telepon 157, dan *chat* WA 081 157 157 157.

PERBANKAN



1.821

Restrukturisasi Pembiayaan/
Pinjaman

Sistem Layanan Informasi Keuangan

Permasalahan Agunan/Jaminan

Penipuan (pembobolan rekening,
skimming, phishing, social engineering)

Penolakan Pelunasan Kredit/
Pembiayaan Dipercepat

IKNB - ASURANSI



286

Persoalan Klaim

Produk/Layanan Tidak Sesuai
Penawaran

Persoalan Polis

Persoalan Premi

Fraud Pegawai PUJK atau Kelalaian
PUJK

IKNB - PEMBIAYAAN



601

Restrukturisasi Pembiayaan/
Pinjaman

Sistem Layanan Informasi
Keuangan

Perilaku Petugas Penagihan

Jumlah Tagihan/Sanggahan
Transaksi

Permasalahan Agunan/Jaminan

PASAR MODAL



30

Return/Imbal Hasil/Margin
Keuntungan

Pencairan Dana

Transaksi Tanpa Persetujuan

Kegagalan/Keterlambatan
Transaksi

Permintaan Pengembalian Dana

FINTECH



616

Perilaku Petugas Penagihan

Restrukturisasi Pembiayaan/
Pinjaman

Penipuan (pembobolan rekening,
skimming, phishing, social engineering)

Penyalahgunaan Data Pribadi

Kegagalan/Keterlambatan Transaksi

Produk Pembiayaan Paling Banyak Diadukan Konsumen

Periode 1 Oktober – 9 Desember 2022

Pengaduan terhadap *financial technology (Fintech)* tercatat melonjak menjelang akhir tahun. Data Layanan dan Kontak OJK mencatat jumlah pengaduan yang masuk dalam periode 1 Oktober 2022 – 9 Desember 2022 didominasi oleh produk Pinjaman *Online* (Pinjol) Multiguna alias *fintech*.

Jumlah pengaduan terkait perusahaan keuangan berbasis

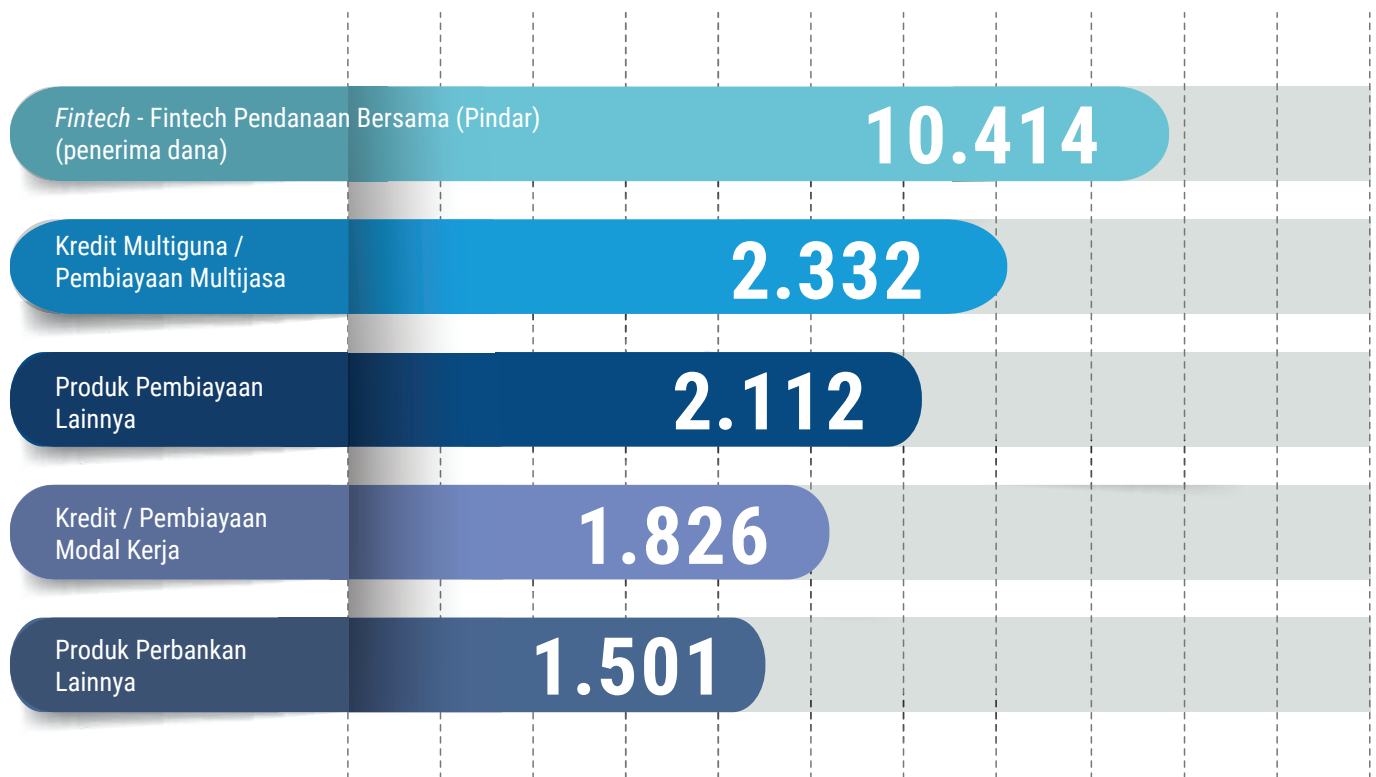
teknologi itu dalam periode ini mencapai 10.414. Rekor tertinggi dibandingkan pengaduan terhadap produk keuangan lainnya.

Di bawah pinjol, aduan terbesar selanjutnya juga terkait produk pembiayaan atau kredit multiguna alias pembiayaan multijasa. Ada 2.332 pengaduan terkait produk pembiayaan ini. Sedangkan pengaduan terbanyak ketiga adalah

produk pembiayaan lainnya (2.112 aduan), kredit atau pembiayaan modal kerja (1.826 aduan), dan produk perbankan lainnya (1.501 aduan).

Untuk memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang cukup, OJK terus melaksanakan *affirmative action* dengan mengintensifkan edukasi untuk menekan pengaduan konsumen melalui jalur pencegahan. ●

TOP 5 PRODUK - PENGADUAN



Data Layanan dan Kontak OJK Data Pertanyaan Triwulan IV Tahun 2022

Periode 1 Oktober 2022 – 9 Desember 2022

Rangkuman data produk dan pertanyaan yang diajukan masyarakat ke OJK sepanjang Oktober hingga Desember 2022 didominasi terkait perusahaan pinjaman *online* multiguna dari penerima dana, termasuk di dalamnya terkait produk multiguna. Sementara itu, pertanyaan didominasi oleh *fintech* dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan terkait lembaga jasa keuangan terdaftar dan berizin di OJK melalui Kontak OJK@kontak157 di nomor telepon 157, dan *chat* WA 081 157 157 157.

PERBANKAN



12.373

Sistem Layanan Informasi Keuangan

Penipuan (pembobolan rekening, *skimming*, *phising*, *social engineering*)

Perilaku Petugas Penagihan

Restrukturisasi Pembiayaan/
Pinjaman

Legalitas LJK dan Produk

IKNB - ASURANSI



893

Persoalan Klaim

Pembukaan Tanpa/Tidak Sesuai
Persetujuan

Produk/Layanan Tidak Sesuai
Penawaran

Legalitas LJK dan Produk

Persoalan Polis Asuransi

IKNB - PEMBIAYAAN



5.089

Sistem Layanan Informasi Keuangan

Perilaku Petugas Penagihan

Penipuan (pembobolan rekening, *skimming*, *phising*, *social engineering*)

Restrukturisasi Pembiayaan/
Pinjaman

Jumlah Tagihan/Sanggahan Transaksi

PASAR MODAL



71

Legalitas LJK dan Produk

Pencairan Dana

Aplikasi Transaksi PUJK (Apps,
Web, SMS, dll)

Sistem Layanan Informasi
Keuangan

Return/Imbal Hasil/Margin
Keuntungan

FINTECH



13.073

Perilaku Petugas Penagihan

Legalitas LJK dan Produk

Restrukturisasi Pembiayaan/
Pinjaman

Sistem Layanan Informasi Keuangan

Permasalahan Bunga/Denda/Pinalti

Pertanyaan Terkait Pinjol Multiguna Mendominasi

Periode 1 Oktober – 9 Desember 2022

Data layanan dan kontak OJK mencatat fintech pendanaan bersama (pindar) menjadi pertanyaan terbanyak yang masuk ke layanan Kontak 157 OJK. Berdasarkan data data Layanan 1 Oktober 2022 hingga 9 Desember 2022.

Pertanyaan terkait fintech pendanaan bersama (pindar) ini berada pada peringkat pertama

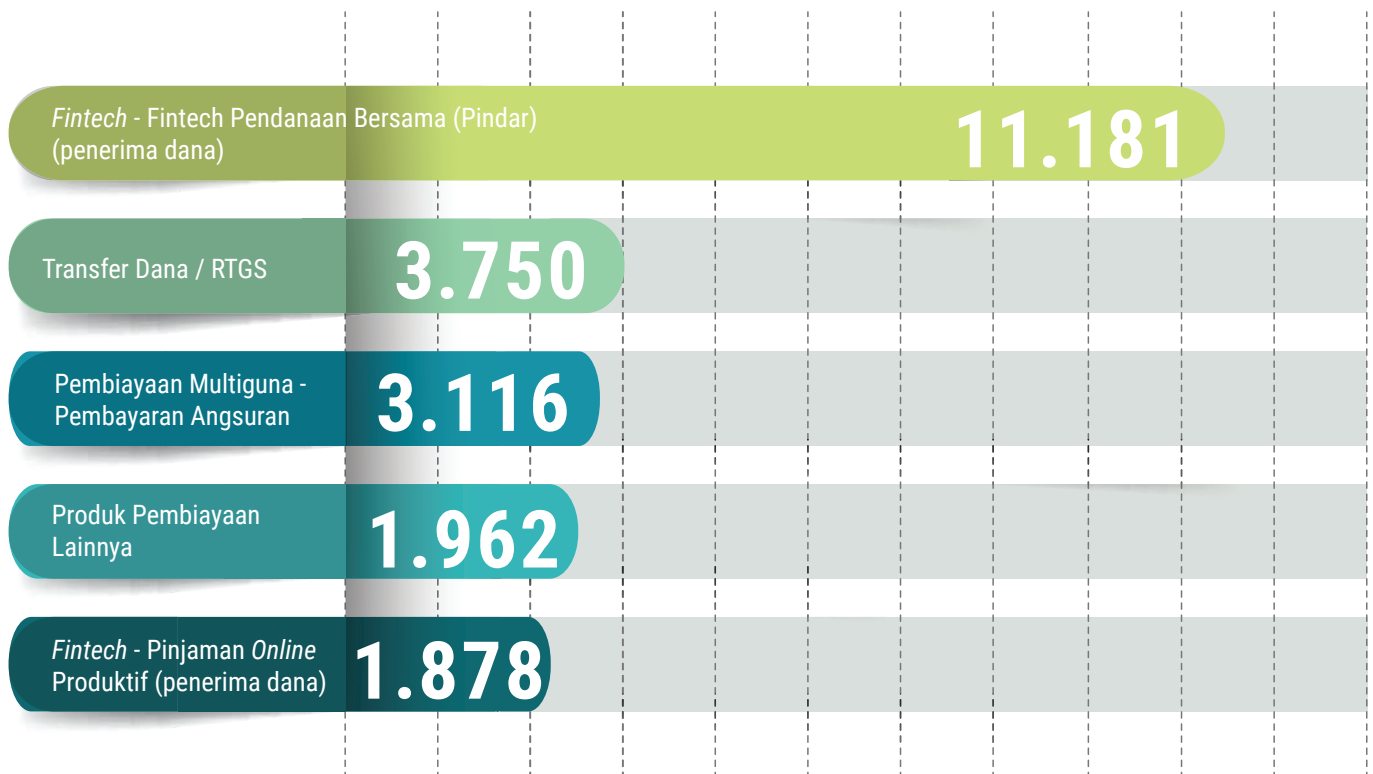
dengan jumlah pertanyaan sebanyak 11.181 pertanyaan. Pertanyaan terkait pinjaman *online* ini mencolok sebagai dibandingkan empat pertanyaan lain yang diajukan ke layanan Kontak 157 OJK.

Pertanyaan yang terbanyak kedua dalam periode ini misalnya, Layanan Kontak 157 OJK menerima 3.750 pertanyaan terkait transfer dana/RTGS. Pada peringkat ketiga,

pertanyaan yang diajukan mengenai pembiayaan multiguna terutama terkait pembayaran angsuran. Jumlah pertanyaan yang diajukan mencapai 3.116.

Sedangkan pada peringkat keempat dan kelima, terdapat pertanyaan soal produk pinjaman lainnya (1.962 pertanyaan) dan pinjaman *online* produktif terkait penerimaan dana (1.878). ●

TOP 5 PRODUK - PERTANYAAN



Iklan Lembaga Keuangan Harus Tepat!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan sebanyak 426 iklan di sektor jasa keuangan melanggar ketentuan, dari 17.960 iklan yang dipantau pada Januari hingga September 2022.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan sepanjang Januari hingga September 2022, OJK telah memantau 17.960 iklan pada sektor jasa keuangan dan menemukan sebanyak 426 iklan melanggar ketentuan.

“Dalam kaitan ini, OJK telah mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian pencantuman materi iklan kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dimaksud yang materi iklannya belum sesuai dengan ketentuan,” jelas Friderica yang akrab disapa Kiki.

Kiki menyebut secara proses, apabila iklan dari suatu lembaga jasa keuangan (LJK) yang dinyatakan melanggar ketentuan OJK, maka akan diberikan peringatan tertulis.

“Namun, apabila masih melakukan pelanggaran pada item yang sama, maka akan diberikan surat peringatan atau dilakukan proses pemanggilan,” jelasnya.

Selain melakukan pemantauan terhadap iklan-iklan itu, OJK meluncurkan beberapa inisiatif dalam kegiatan untuk menjaga

keamanan konsumen. Inisiatif dari OJK ini antara lain, layanan *chatbot* dan modul literasi keuangan digital terkait kanal pengaduan konsumen serta program peningkatan kapasitas SDM dalam bidang *supervisory technology (suptech)* dan *regulatory technology (regtech)*.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Dia menegaskan bahwa pemantauan terhadap iklan jasa keuangan terus dilakukan. Hal ini mengingat iklan merupakan lini pertama pengenalan produk dan layanan keuangan kepada masyarakat.

“Ke depan, OJK akan terus mengembangkan industri jasa keuangan yang sehat, efisien, dan berintegritas,” lanjutnya.

Adapun, pengembangan industri jasa keuangan tersebut salah satunya dilakukan dengan meningkatkan integritas di sektor jasa keuangan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan praktik terbaik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mahendra meyakini penerapan SMAP dapat menciptakan budaya anti penyuapan secara konsisten dan penerapan pengendalian yang kuat di industri jasa keuangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efisiensi kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.

“Dengan langkah-langkah tersebut, OJK optimis bahwa sektor jasa

keuangan akan lebih *resilient* dalam menghadapi kondisi ketidakpastian ke depan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Mahendra menekankan bahwa OJK senantiasa proaktif dan memperkuat kolaborasi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal serta turut menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

OJK selama ini telah melakukan pengawasan terhadap iklan-iklan dari penyedia jasa keuangan, termasuk perbankan yang berpotensi menyesatkan dan merugikan nasabah. ●

Untuk mengatur iklan berkaitan dengan jasa keuangan, OJK menerbitkan Pedoman Iklan Jasa Keuangan. Regulasi yang terbit pada Maret 2019 tersebut mengalami penyesuaian agar selalu relevan, yakni pada April 2020, Agustus 2020, dan Oktober 2020.

Oleh karena itu, Pedoman Iklan Jasa Keuangan Perubahan Ketiga pada Oktober 2020 menjadi dasar sekaligus panduan bagi perusahaan jasa keuangan dalam melakukan promosi.

1. Histori Poin Perubahan Pedoman Iklan Jasa Keuangan

Maret 2019

Kata pengantar Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

April 2020

Penghapusan kewajiban penggunaan logo OJK dalam materi iklan

Agustus 2020

- Penyesuaian ketentuan terkait kelengkapan informasi dengan iklan di media sosial dan media daring
- Penyempurnaan frasa dalam uraian ketentuan mengenai informasi yang dimuat dalam iklan
- Pencantuman *disclaimer* dalam pendahuluan
- Penyempurnaan ilustrasi contoh iklan dan penjelasan
- Penyempurnaan materi pada *question & answer*

2. Ketentuan Informasi Iklan di Media

Berdasarkan Pedoman Iklan Jasa Keuangan Perubahan Ketiga pada Oktober 2020, ada sejumlah poin yang diatur dalam regulasi tersebut perihal iklan di media.

- **Informasi Akurat**

- Kata superlatif
- Kinerja masa lalu dan proyeksi kinerja
- Penggunaan data riset

- **Informasi Jujur**

- **Informasi Jelas**

- Bahasa mudah dipahami
- Kelengkapan informasi dan pencantuman tautan
- Pernyataan PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi mengenai Produk dan/atau layanan syariah
- Tanda asterisk
- Janji pengembalian uang
- Ketersediaan hadiah

- **Informasi Tidak Menyesatkan**

- Penggunaan kata gratis
- Penggunaan kata berlebihan
- Kesaksian konsumen dan anjuran
- Proses yang sesuai dengan prosedur dan penawaran yang tidak menyesatkan
- Pemeran iklan
- Tampilan uang
- Berkompetisi secara sehat
- Penggunaan istilah
- Klaim halal
- Pemasaran berdasarkan hadiah



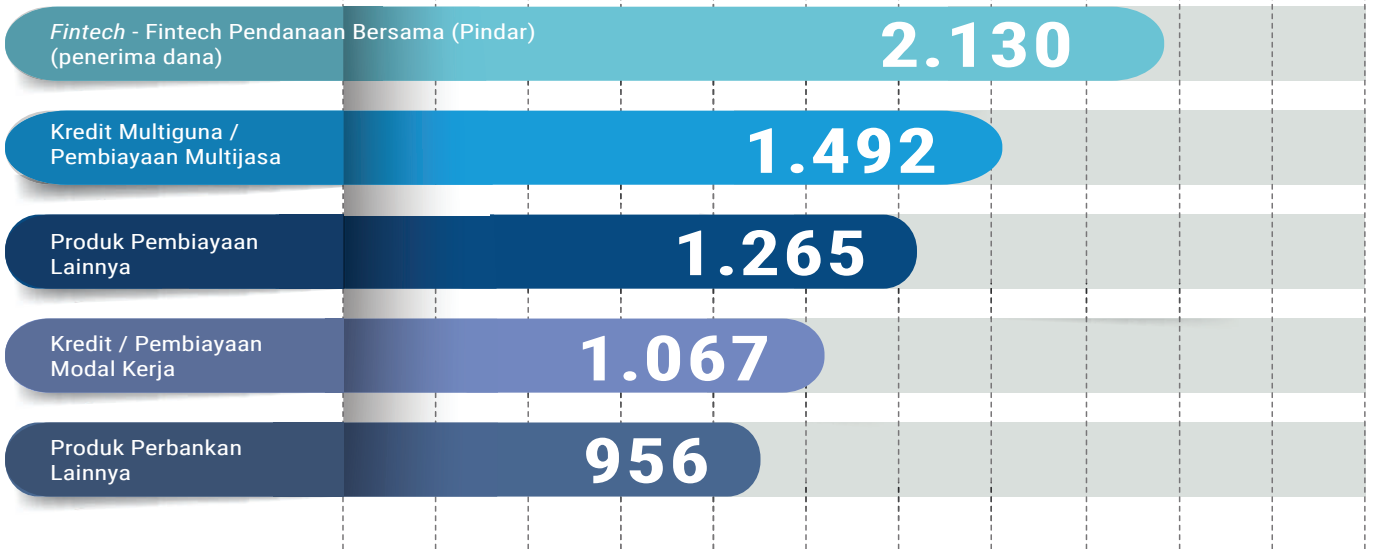
Data Layanan dan Kontak OJK

Periode 1 Januari 2022 – 9 Desember 2022

Data Pengaduan Tahun 2022



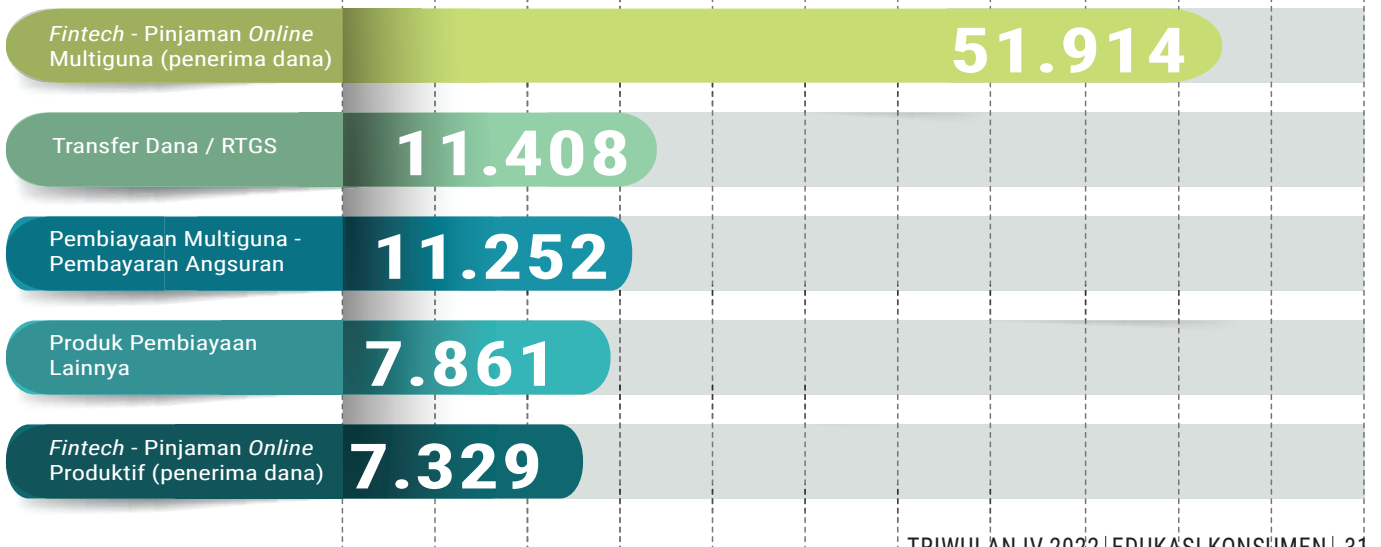
Top 5 Produk - Pengaduan



Data Pertanyaan Tahun 2022



Top 5 Produk - Pertanyaan

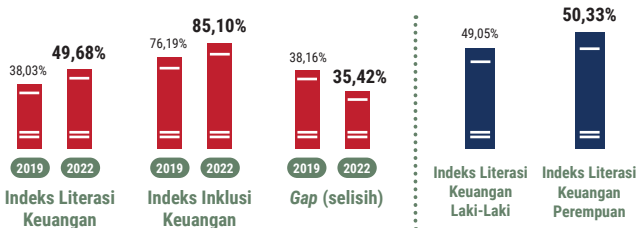


Capaian Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas keuangan, OJK berkomitmen untuk terus melaksanakan program edukasi keuangan secara masif, baik secara tatap muka (*offline*) maupun daring (*online*) melalui *Learning Management System* (LMS) dan media sosial.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022

- Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat
- *Gap* Literasi dan Inklusi Keuangan Mengecil
- Indeks Literasi Keuangan Perempuan Lebih Tinggi dari Laki-laki



Edukasi Keuangan



1.897
Kegiatan Edukasi



9,1 Juta
Peserta

Edukasi melalui *Minisite* dan Media Sosial Sikapi Uangmu



404
Konten Edukasi



2,2 Juta
Pengunjung

Edukasi melalui LMS Edukasi Keuangan

7.982 Pengguna
11 Modul Edukasi

5.216
Sertifikat Diterbitkan

Inklusi Keuangan



Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

- 482 TPAKD
- 34 Provinsi
- 448 Kabupaten/Kota
- 1.360 Program Kerja



Satu Rekening Satu Pelajar

- 52,4 Juta Rekening Pelajar
- Nominal Rp29,2 Triliun



Simpanan Mahasiswa dan Pemuda

- 584 Ribu Rekening
- Nominal Rp1,8 Triliun



Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir

- 984 Ribu Debitur
- Nominal Rp25,6 Triliun



Bulan Inklusi Keuangan

7 Juta Rekening

Kontak OJK 157 Menerima 315.783 Layanan Konsumen

Sampai dengan 30 Desember 2022, OJK telah menerima 315.783 layanan, termasuk 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa yang masuk ke dalam LAPS SJK. Tercatat 13.332 dari pengaduan tersebut telah terselesaikan.

OJK Pantau 17.960 Iklan Sektor Jasa Keuangan

Sepanjang Januari-September 2022, OJK juga telah memantau 17.960 iklan sektor jasa keuangan dan menemukan 426 iklan melanggar ketentuan yang berlaku.

OJK telah mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian pencantuman materi iklan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang materi iklannya belum sesuai dengan ketentuan.



Pacu Peningkatan Pemahaman Produk Keuangan dengan Revisi POJK 76 Tahun 2016

Untuk meningkatkan literasi maupun inklusi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melakukan revisi POJK 76 tahun 2016 yang mengatur tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan masyarakat.



“Kita sedang merevisi POJK [POJK 76 tahun 2016] ini,” ujar Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Edwin Nurhadi, dalam pembukaan Financial Expo (FinExpo) tahun 2022, Rabu (26/10).

Edwin belum merinci poin-poin apa saja yang bakal direvisi dari POJK tersebut. Salah satu kemungkinan yang bakal direvisi dari POJK tersebut terkait kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk melakukan kegiatan literasi pada masyarakat.

Lebih lanjut, Edwin mengatakan selama ini PUJK memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan literasi pada masyarakat sebanyak satu kali dalam setahun. Nantinya, OJK akan mendorong kegiatan literasi lebih dari satu kali per tahun.

“Kita akan dorong nantinya lebih dari satu kali,” imbuhnya.

Di sisi lain, Edwin juga mengatakan bahwa untuk mendorong inklusi

keuangan di daerah, OJK juga telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tim TPAKD yang saat ini sudah mencapai 452 tersebut bertugas untuk melakukan pemerataan akses keuangan di daerah.

Percepatan-percepatan tersebut dilakukan untuk merealisasikan target yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo, yaitu inklusi keuangan mencapai 90% pada 2024.

Sementara itu, OJK juga mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 pada penutupan FinExpo. Hasil survei tersebut menunjukkan peningkatan indeks literasi dan inklusi dibandingkan hasil survei pada tahun 2019.

“Hasil SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia 49,68% dan inklusi keuangan 85,10%. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2019,

yaitu indeks literasi keuangan 38,03% dan inklusi keuangan 76,19%,” ujar Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Sabtu (29/10).

Menurut Friderica, SNLIK bertujuan untuk memetakan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk literasi keuangan digital. Hasil SNLIK diharapkan dapat menjadi dasar bagi OJK dan seluruh pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan, menyusun strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta bisa meningkatkan perlindungan masyarakat. ●



OJK Gandeng KPK Antisipasi Korupsi Sektor Keuangan

Tindak pidana korupsi dapat terjadi di segala sektor termasuk industri jasa keuangan. Menegaskan komitmen untuk menjaga industri jasa keuangan, OJK bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar *workshop* kolaboratif bertajuk Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam sambutannya menjelaskan bahwa tantangan ke depan yang harus dihadapi dalam pemberantasan korupsi semakin luas dan berkembang, termasuk di dalamnya perkembangan kejahatan di sektor jasa keuangan. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung upaya pencegahan korupsi pada sektor ini.

“Peran OJK sangat signifikan dalam membantu tugas pemberantasan korupsi melalui Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan,” kata Alex.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa OJK sendiri memiliki peran yang sangat penting

dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apabila industri jasa keuangan berlangsung secara sehat dan bebas korupsi, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena pendapatan dan belanja masyarakat juga mengalami peningkatan. *Financial crime* atau kejahatan keuangan yang saat ini terjadi di Indonesia semakin sulit dibuktikan, beragam, dan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi digital.

Oleh karenanya, lembaga jasa keuangan saat ini telah mengeksplorasi sumber data baru bagi solusi penipuan dan kebijakan termasuk, kecerdasan perangkat dari ponsel, pencocokan identitas, media sosial, dan jaringan profesional serta data telekomunikasi yang bersifat *real time*.

“Melihat semakin canggihnya sistem yang dibuat oleh lembaga keuangan dalam mencegah dan mengimbangi *fraud* yang masif dilakukan dalam sektor keuangan, maka dari sisi penegakan hukum perlu memahami sistem pencegahan yang ada tersebut serta memiliki kompetensi dalam mendalami modus-modus

yang dilakukan dalam melakukan *fraud* yang terjadi,” kata Alex.

Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan *Workshop* Kolaboratif ini karena dapat menjadi sarana untuk berdiskusi serta saling memberikan masukan dalam mewujudkan koordinasi dalam rangka penegakan hukum sektor jasa keuangan yang optimal, khususnya di Bidang Pasar Modal.

“Tepat sekali bahwa OJK dan Aparat Penegak Hukum termasuk KPK berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan upaya-upaya yang secara serius membersihkan Pasar Modal Indonesia dari para pelaku kejahatan finansial yang dapat merugikan kepentingan industri Pasar Modal maupun perekonomian Indonesia,” kata Mirza.

Mengingat perannya yang sangat strategis dan beragamnya jenis investasi, Pasar Modal Indonesia tidak luput dari incaran/sasaran pihak-pihak pelaku kejahatan terutama kejahatan finansial.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) mengatur berbagai tindak pidana di Pasar Modal yang mungkin terjadi, di antaranya terkait dengan tindak pidana *insider trading*, manipulasi pasar, *misleading information* dan beberapa tindak pidana lain terkait dengan kewajiban perizinan/persetujuan/pendaftaran.

KPK dan OJK berharap kegiatan ini dapat mempererat jalinan kerja sama antara kedua lembaga serta membangun sebuah *community of practice* antara OJK dan KPK untuk mengawal proses penegakan hukum di industri Pasar Modal dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. ●





Dukungan Sektor Keuangan untuk Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengencangkan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Langkah tersebut menitikberatkan pada kualitas pariwisata dibandingkan kuantitas.

Pengembangan pariwisata yang mengutamakan kelestarian lingkungan ini pun berpotensi menjadi momentum untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata pascapandemi Covid-19.

“Pariwisata berkelanjutan adalah sebuah proses, bukan hasil akhir, yang tercermin dalam setiap penetapan kebijakan oleh Kemenparekraf,” ujar Direktur Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Agustini Rahayu, dalam diskusi Urban Forum-Forwada Tourism & Hospitality Industry Outlook 2023.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Frans Teguh, menyampaikan bahwa sudah saatnya masyarakat memikirkan kembali dan menata ulang mengenai konsep pariwisata agar dapat diarahkan menuju pariwisata yang berkelanjutan.

“Selayaknya perkembangan yang ada, dengan tantangan yang kita miliki, atau dengan dinamika yang terjadi, kita semua

masyarakat pariwisata perlu memikirkan kembali, kita menata ulang, kita *re-defining*, dan kita *re-setting*. Ini sesuatu yang harus menjadi *strategic approach* untuk mendukung pariwisata yang lebih berkelanjutan,” kata dia.

Melihat potensi yang besar, Frans menilai, kerangka berpikir masyarakat mengenai konsep pariwisata berkelanjutan perlu terus dibangun, tidak sekadar menghadirkan destinasi pariwisata hijau.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 476.970 kunjungan, naik 6.396,46% dibandingkan dengan periode Juli 2021.

Secara kumulatif, dari periode Januari hingga Juli 2022, jumlah kunjungan wisman melalui pintu masuk utama mencapai 1,22 juta kunjungan, meningkat sebesar 1.434,39% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021.

Tercatat, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat, dari 4,11% pada 2017, naik menjadi 4,5% dan 4,7% pada 2018 dan 2019.

Pada 2020, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB tercatat turun menjadi 4,05% disebabkan pandemi Covid-19, namun kembali meningkat menjadi 4,2% pada 2021.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan

Konsumen (EPK), Friderica Widyasari Dewi, dalam acara Bangga Buatan Indonesia di Padang menyatakan, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi baru di daerah diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pemulihan ekonomi nasional.

“OJK terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan melakukan berbagai program pengembangan UMKM seperti memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan bagi para pelaku UMKM,” katanya.

Data Statistik Perbankan Indonesia mencatat penyaluran kredit ke sektor pariwisata mencapai Rp590,97 triliun per Mei 2022. Jumlah tersebut dengan asumsi kredit pariwisata meliputi penyaluran kredit ke sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp161,85 triliun, sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum Rp121,03 triliun, dan sektor transportasi Rp308,09 triliun.

Dengan asumsi kredit yang benar-benar disalurkan untuk sektor pariwisata sebesar 20% dari Rp590,97 triliun itu, maka kredit yang disalurkan ke sektor ini mencapai Rp118,19 triliun atau 2,06% dari total kredit perbankan Rp5.741,09 triliun per Mei 2022.

Laju penyaluran kredit ke sektor pariwisata, khususnya yang berbasis berkelanjutan, diharapkan sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit perbankan ke sektor berkelanjutan secara keseluruhan. ●



Fintech Agregator Berperan Membawa UMKM ke Ranah Global

Perluasan pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu persoalan yang perlu dipecahkan. Diperlukan setidaknya empat kunci untuk membuka UMKM Tanah Air tidak saja memenangkan pasar dalam negeri namun hingga ke tingkat global.

Langkah pertama, UMKM perlu didorong untuk fokus pada pemenuhan aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi. UMKM juga perlu memperhatikan keunggulan dan mempersiapkan produk yang diminati pasar, baik domestik maupun internasional.

Kedua, memperkuat kelembagaan dan manajemen usaha. Ketiga, meningkatkan *mindset* dan keinginan berkompetisi di ranah digital, dan keempat, adalah dengan mempelajari prosedur ekspor, dapat dimulai dengan *onboarding* pada platform *e-commerce* maupun bekerjasama dengan *aggregator*.

Ahmad Buchori, *Advisor Strategic Committee* OJK dalam seminar 'Peran Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Inklusi dan Digitalisasi UMKM' menuturkan OJK terus memberikan dukungan untuk meningkatkan akses keuangan pelaku usaha kecil dan menengah.

Langkah itu dilakukan baik melalui edukasi keuangan, layanan keuangan mikro, pembinaan UMKM melalui CSR industri jasa keuangan, kredit melawan rentenir, asuransi mikro, hingga pembentukan ekosistem keuangan digital.

"OJK mendorong pembiayaan UMKM melalui *fintech* P2P dan DigiKu dengan penyaluran *fintech*

sebesar Rp310,77 triliun dengan 75 juta entitas peminjam dan 830.000 pemberi pinjaman," ulasnya tentang peran besar OJK bagi UMKM.

Sebagaimana diketahui, salah satu tantangan dalam mendorong pengembangan UMKM adalah akses pembiayaan yang masih terbatas.

Namun, kehadiran *financial technology (fintech)* saat ini dapat menjadi alternatif bagi UMKM untuk mengakses produk jasa keuangan, yang selama ini sulit mendapatkan akses dari lembaga keuangan formal. Kerjasama juga dapat dilakukan oleh UMKM melalui *fintech aggregator*. Entitas ini juga memiliki fungsi edukasi dan literasi, disamping berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Fintech aggregator atau *aggregator* merupakan situs web atau aplikasi yang membantu nasabah untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan menghimpun, menyaring, dan membandingkan informasi produk dan layanan antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara digital.

Nasabah atau konsumen dapat menggunakan layanan *aggregator* untuk mengetahui informasi mengenai produk-produk LJK seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kartu kredit, jenis-jenis tabungan, produk asuransi, maupun produk pembiayaan lainnya. Tercatat, per Mei 2022, terdapat 32 *fintech aggregator* yang terdaftar sebagai penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) di OJK.

Namun demikian, perlu menjadi perhatian nasabah untuk tetap waspada dalam menjaga keamanan



data pribadi, selalu berhati-hati memberikan data keuangan kepada pihak ketiga, dan jangan memberikan akses data kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Pengamat usaha mikro dan kecil dari Universitas Gadjah Mada, Handy Setyawan, menyampaikan bahwa partisipasi UMKM Indonesia dalam rantai pasok global masih sangat rendah, hanya sebesar 4,1%.

Posisi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, seperti Malaysia yang tercatat mencapai 46,2%, Thailand 29,6%, Filipina 21,4%, dan Vietnam 20,1 %.

Dia mengatakan, upaya pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke rantai pasok global semakin relevan, terutama di tengah ketidakpastian potensi ekonomi global. ●



Tindak Tegas OJK Berantas Pinjol Ilegal Hingga Investasi Bodong

OJK telah memblokir 618 pinjaman *online* ilegal atau pinjol ilegal sepanjang 2022, terhitung sejak Januari – November 2022. Tak hanya itu, OJK juga telah melakukan penindakan terhadap 97 entitas investasi ilegal/bodong dan 82 entitas gadai ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono menegaskan bahwa regulator secara aktif berkolaborasi dengan asosiasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kementerian/lembaga lain, serta aparat penegak hukum dalam wadah Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk menindak ratusan entitas ilegal yang merugikan masyarakat.

Tercatat, sepanjang November 2022 saja, OJK telah melakukan penindakan terhadap 41 pinjol ilegal, 5 entitas investasi ilegal, dan 77 entitas gadai ilegal.

“Artinya, sepanjang 2022, telah dilakukan penindakan terhadap 618 pinjaman *online* ilegal, 97 entitas investasi ilegal, dan 82 entitas gadai ilegal,” kata Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisiner Bulanan (RDKB) November 2022 secara daring awal Desember lalu.

Lantas, bagaimana cara membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal yang berizin OJK?

Berikut 9 ciri-cirinya:

Pinjol Ilegal Tak Berizin OJK

1. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran
3. Pemberian pinjaman sangat mudah
4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
5. Ancaman teror, intimidasi, dan pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
6. Tidak mempunyai layanan pengaduan
7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Pinjol Legal Berizin OJK

1. Terdaftar/berizin dari OJK
2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
3. Pemberian pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu
4. Bunga atau biaya pinjaman transparan
5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center*, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform *fintech* yang lain
6. Mempunyai layanan pengaduan
7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI ●





Modus Penipuan Berkedok Investasi Melalui Penjualan Toko *Online*

Ramainya transaksi digital pada platform toko *online* pun menjadi ruang bagi oknum tak bertanggungjawab untuk beraksi melancarkan penipuan. Kasus terbaru melibatkan mahasiswa IPB dan masyarakat sekitar kampus yang melibatkan penipuan berkedok toko *online*.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan bahwa pelaku menggunakan modus penipuan berkedok kerja sama usaha penjualan *online* melalui toko *online* yang dimiliki dengan tawaran imbalan 10% per transaksi.

Menurut Tongam, pelaku meminta mahasiswa membeli barang di toko *online* miliknya. Apabila mahasiswa tidak mempunyai uang, maka pelaku meminta mahasiswa meminjam secara *online*.

Uang hasil pinjaman itu kemudian masuk ke pelaku, tetapi barang tidak diserahkan ke pembeli, atau pembelian secara fiktif dari toko *online* pelaku. Pelaku berjanji akan membayar cicilan utang dari pemberi pinjaman tersebut, sehingga mahasiswa tertarik untuk ikut berinvestasi.

Dalam perkembangannya, pelaku tidak memenuhi janjinya untuk membayar cicilan utang, sehingga tenaga penagih melakukan penagihan kepada mahasiswa sebagai peminjam.

“Kasus ini bukan masalah pinjol, tetapi penipuan berkedok toko *online* dengan pembiayaan pembelian barang yang ternyata

barangnya fiktif, tetapi uangnya mengalir ke pelaku,” kata Tongam pertengahan November lalu.

Oleh karena itu, Tongam, menegaskan bahwa SWI mendorong proses penegakan hukum kepada pelaku penipuan ini dan sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor dan pihak Rektorat IPB.

“Kami akan melakukan sosialisasi investasi ilegal untuk menghindari korban lain dan menyampaikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mahasiswa yang jadi korban penipuan tersebut,” ujarnya.

KENALI MODUS

Untuk menghindari kejadian serupa terulang. Masyarakat harus mengenali sejumlah modus yang kerap dilakukan penipu dengan media toko *online*.

Pertama, seperti yang dialami mahasiswa IPB, pelaku membuat toko *online* palsu. Biasanya, penipu yang berkedok penjual *online* palsu di *marketplace* dan media sosial menjual barang dengan harga di bawah pasaran, sehingga membuat calon pembeli langsung tertarik bertransaksi.

Pada kasus pembelanjaan antar negara, terkadang penipu juga dapat

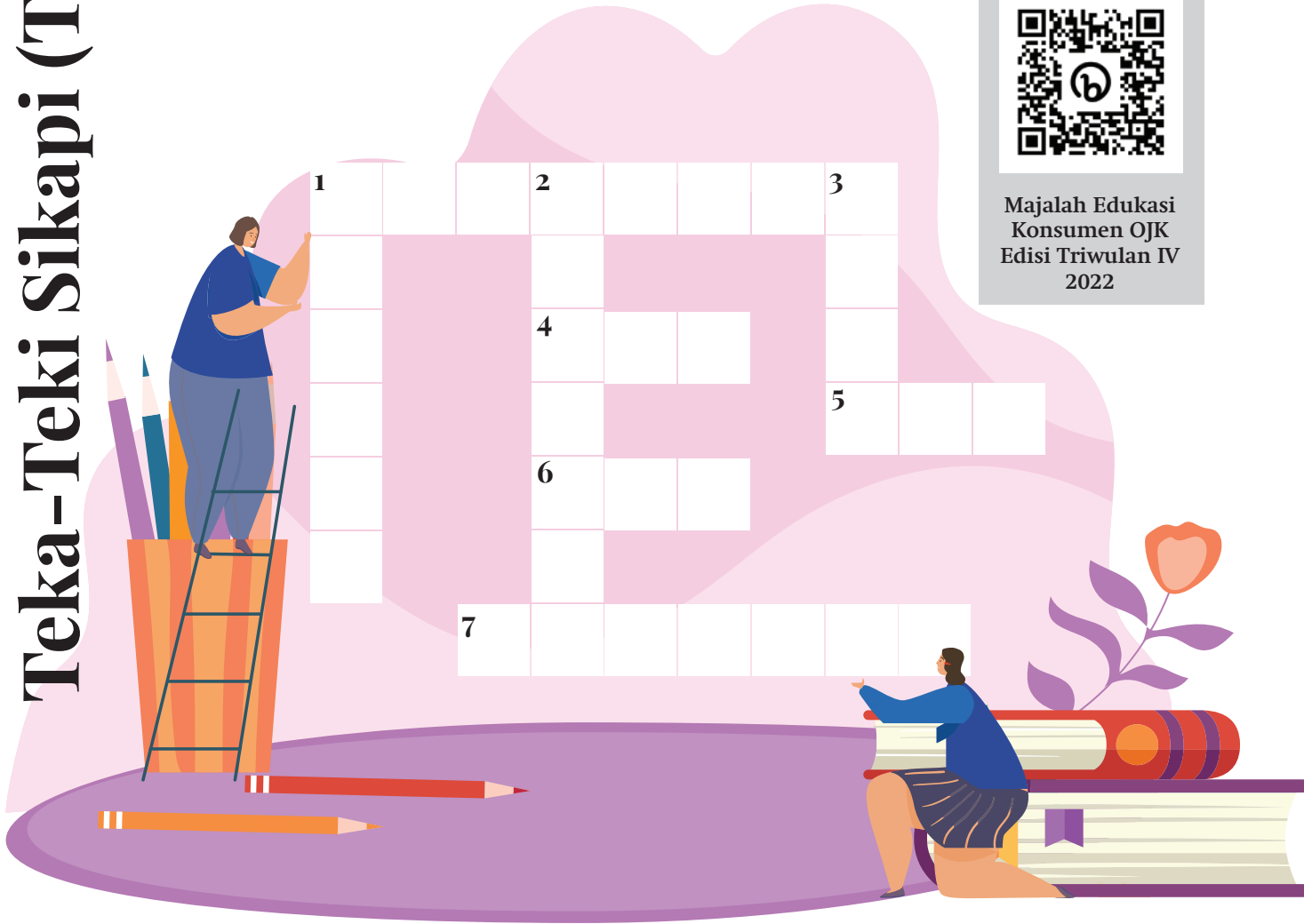
mengaku sebagai petugas ekspedisi ataupun pihak Bea Cukai yang meminta biaya tambahan dengan alasan barangnya ditahan di Bea Cukai.

Modus kedua, adalah *phising*. Menurut Andi, modus *phising* biasanya mengarahkan pembeli untuk masuk ke situs atau halaman belanja palsu. Terkadang penipu juga bisa mengirim *chat*, email atau *link* yang mengarahkan korban untuk mengisi data pribadi, *password* atau kode OTP.

Tak berhenti di situ, modus lainnya yang biasa terjadi adalah bukti transaksi palsu. Modus ini dilakukan penipu dengan berpura-pura menjadi pembeli. Penipu akan mengirim bukti transaksi yang sudah diedit sehingga penjual mengira ada transaksi pembelian. ●



Teka-Teki Sikapi (TTS)



Scan di sini



Majalah Edukasi
Konsumen OJK
Edisi Triwulan IV
2022

MENDATAR

1. Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan.
4. Obligasi Ritel Indonesia
5. Bursa Efek Indonesia
6. Otoritas Jasa Keuangan
7. Si Mobil Literasi Edukasi Keuangan

MENURUN

1. *Second way out* penyelesaian kredit macet
2. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.
3. Singkatan dari informasi debitur

- Kirim TTS yang sudah diisi melalui *story* instagram dan *mention* @Sikapiuangmu sebelum tanggal 28 Februari 2023
- Tersedia *e-money* bagi 3 orang pemenang
- Selamat kepada @juliatarigaan pemenang Quiz Sikapiuangmu pada Majalah Edukasi Konsumen Triwulan III tahun 2022



Pandu Sjahrir,
Ketua Umum Dewan Pengurus Harian
Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)

Mewujudkan *Fintech* Sebagai Ruang Ekonomi Digital yang Aman

Pandu Patria Sjahrir punya beragam gelar yang membuatnya dapat lampu sorot saban hari. Pandu adalah Komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI), Presiden Komisaris Sea Group yang membawahi Shopee dan Garena, hingga Wakil Direktur Utama perusahaan energi PT TBS Energi Utama Tbk.

Namun, di balik rekam jejak menterengnya di berbagai institusi dan organisasi, Pandu juga kenyang pengalaman dan punya kontribusi besar pada industri *fintech*. Karenanya, tidak heran bila sejak 2021, namanya dipilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) periode 2021-2025.

Fintech, di satu sisi, memang masih jadi barang yang asing bagi sebagian besar populasi Indonesia, terlepas dari penetrasi agresif sektor ini dalam beberapa tahun terakhir. Buktinya, data SNLIK 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan pada sektor ini berada pada level 2,56% saja. Terendah dibandingkan sektor jasa keuangan lain.

Kendati demikian, Pandu secara pribadi meyakini bahwa *fintech* Indonesia punya potensi besar.

“Meski masih dalam tahap awal, saya yakin layanan teknologi finansial di Indonesia memiliki

potensi pertumbuhan yang sangat besar seperti China dan Amerika untuk mendukung ekonomi nasional dan inklusi keuangan.”

Bukan suatu kejutan bila Pandu punya sebuah visi untuk kepentingan perekonomian Indonesia. Sebab, latar belakangnya memang berasal dari keluarga yang punya kepekaan tinggi perihal isu itu. Pandu, yang lahir di Boston, Amerika Serikat pada 17 Mei 1979 adalah putra dari pasangan ekonom Sjahrir dan Nurmala Kartini Pandjaitan.

Dia meraih sarjana dari University of Chicago, Amerika Serikat dan Master of Business Administration dari Stanford Graduate School of

Business, Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam, Pandu juga sempat berkariier sebagai analis di Matlin & Patterson dan juga di Lehman Brothers.

Sepulangnya ke Indonesia, Pandu berbisnis dengan pamannya, Luhut Binsar Panjaitan di Toba Bara Sejahtera Tbk., atau yang sekarang dikenal dengan nama TBS Energi. Dia aktif berorganisasi di Asosiasi Pengusaha Tambang Batu Bara (APBI) namun di tengah kesibukan itu, Pandu masih punya kontribusi besar di industri *fintech*.

Kontribusi itu dia wujudkan lewat kiprah sebagai *Managing Partner* di Indies Capital. Indies merupakan





Ini fokus kami [Aftech] nomor satu. Karena ini juga memberikan efek langsung kepada para pemain fintech yang legal. Kami bersama Bank Indonesia dan OJK mencoba memberantas pemain-pemain pinjol ilegal.

perusahaan modal ventura yang memberikan pendanaan untuk entitas-entitas teknologi di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Selain Indies, dia juga aktif berkiprah di AC Venture.

Rekam jejak di modal ventura itu pula yang kemudian membuat Pandu banyak bersinggungan dengan para pendiri dan pelaku *startup*. Termasuk *fintech* pada segmen pembiayaan atau *lending*. Karenanya, Pandu tahu betul bahwa salah satu kunci sukses memastikan *fintech* berkontribusi terhadap perekonomian negara adalah dengan meningkatkan kredibilitas *fintech lending*.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik pinjol ilegal cukup meresahkan. Dan Pandu melihat bahwa hal ini perlu diperangi sebelum kian menjamur.

“Ini fokus kami [Aftech] nomor satu. Karena ini juga memberikan efek langsung kepada para pemain *fintech* yang legal. Kami bersama Bank Indonesia dan OJK mencoba memberantas pemain-pemain pinjol ilegal,” kata Pandu dalam wawancara media.

Sebagai konteks, sepanjang tahun 2022 saja, Satgas Waspada Investasi OJK menemukan 618 pinjol ilegal sempat beroperasi di masyarakat. 618 entitas itu kemudian memperbanyak jumlah pinjol yang telah ditutup OJK menjadi 4.352. Namun, praktik pinjol ilegal diperkirakan masih akan tetap bermunculan.

Sebagai pucuk pimpinan Aftech, Pandu pun tentu tidak tinggal diam. Belakangan, Pandu dan Aftech merilis laman cekfintech.id yang dapat digunakan masyarakat untuk mengecek legalitas suatu layanan pinjol. Dia punya keyakinan bahwa modus-modus penipuan modern mesti disikapi dengan cara yang tidak kalah modern. “Di situ, semua orang bisa melihat apakah [pinjol] ini legal atau tidak. Menggunakan perusahaan yang memiliki izin atau tidak.”

Selain meluncurkan berbagai program dan kampanye kiwari, AFTECH di bawah komando Pandu juga aktif bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu sinergi ini, misalnya, diwujudkan dengan program Bulan Fintech Nasional yang merangkul Bank Indonesia dan OJK.

Bulan Fintech Nasional merupakan rangkaian acara yang menjembatani para pendiri *fintech* dengan regulator, lembaga keuangan, investor, akademisi, dan *stakeholder* lain. Di dalamnya meliputi acara expo dan diskusi dalam rangka membuat kiprah dan kontribusi *fintech* berkelanjutan dan solid.

“Dengan kolaborasi yang semakin solid, kami percaya perekonomian masyarakat akan kembali pulih, bahkan dampak positifnya akan dirasakan dalam jangka panjang,” kata Pandu. ●

Yohanes Arts Abimanyu,
Direktur Utama IdScore Indonesia

Membumikan *Credit Scoring*

Yohanes Arts Abimanyu kembali dipercaya dan menjabat sebagai Direktur Utama Pefindo Biro Kredit (IdScore) untuk 2 tahun kedepan hingga 2024. IdScore merupakan sebuah lembaga pengelola informasi perkreditan atau biro kredit, yang merupakan anak usaha dari Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Abimanyu atau yang kerap disapa Abi, sudah berkecimpung di industri finansial sejak terjun ke dunia karir, sebegitunya dia lulus dari Universitas Indonesia (UI) dengan gelar Sarjana Ekonomi.

Lulus pada 1996, dia langsung berkarir di Kantor Akuntan Publik Prasetyo-Utomo & Co (Arthur Andersen) sebagai auditor hingga 1997. Bekerja di industri finansial, semakin membuatnya tertarik pada industri capital market.

Abi kemudian melamar pekerjaan di Bursa Saham Jakarta, yang saat ini dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI). Berkarir selama 10 tahun di BEI, ia memulai dengan posisi sebagai editor dan posisi terakhirnya di lembaga tersebut sebagai kepala akuntan di divisi keuangan.

Selanjutnya, pada 2013, Abi melanjutkan karirnya di Pefindo sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Kepatuhan. Pada masa jabatannya ini, dia membangun bisnis baru, yaitu biro kredit. Dia pun dipercaya untuk memimpin IdScore sejak 2016 dan didapuk sebagai Direktur Utama IdScore sejak 2017.

Di tengah kesibukannya berkarir, Abi kembali melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program Pasca Sarjana di Fakultas Ekonomi UI, jurusan Ilmu Manajemen Keuangan, dan mendapatkan gelar master pada 2005.

Sedangkan IdScore dibangun untuk berperan untuk membantu individu untuk pinjaman ke lembaga keuangan seperti perbankan ataupun perusahaan pembiayaan.

Istilah *credit scoring* memang masih terdengar asing di masyarakat. Namun, dia memandang *credit scoring* merupakan hal yang sangat penting karena dapat membantu masyarakat untuk mengakses pinjaman ke lembaga keuangan, seperti perbankan maupun perusahaan pembiayaan.

Istilah *credit scoring* memang masih terdengar asing di masyarakat. Namun, dia memandang *credit scoring* merupakan hal yang sangat penting karena dapat membantu masyarakat untuk mengakses pinjaman ke lembaga keuangan, seperti perbankan maupun perusahaan pembiayaan.



Bagi individu, informasi perkreditan merupakan cerminan dari reputasi keuangan yang dapat memudahkan individu mengakses pembiayaan.

Credit scoring menurutnya tak kalah penting bagi perusahaan, baik lembaga keuangan maupun perusahaan non lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman, karena *credit scoring* membantu proses analisa kredit sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan cermat.

Dia beranggapan, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *credit scoring* masih menjadi tantangan. Padahal, *credit scoring* merupakan salah satu faktor penentu utama yang menentukan pengajuan kredit disetujui.

“Terlepas dari memiliki agunan, *credit scoring* sudah menjadi salah satu faktor yang utama yang bisa menentukan pengajuan kredit disetujui atau tidak. Hal ini dikarenakan dengan fasilitas yang semakin banyak ditawarkan, perbankan juga semakin berhati-hati,” kata dia.

Dia berharap, *credit scoring* ke depan tak lagi asing dan bisa masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga akses pembiayaan di Tanah Air dapat semakin diperluas. ●



BIK 2022: Akselerasi Keuangan Hingga ke Ujung Indonesia

Edukasi dan literasi dalam Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 sukses membawa jutaan pengguna layanan baru tergabung ke dalam sistem keuangan.

Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari mengatakan BIK digelar dengan tema “Inklusi Keuangan Meningkatkan, Perekonomian Semakin Kuat”. Tema ini sejalan dengan upaya pemulihan perekonomian setelah terdampak pandemi.

“Tahun ini kami ambil tema itu, agar sektor jasa keuangan mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong eksplorasi jumlah rekening hingga polis,” ujar Friderica dalam puncak acara BIK 2022 di Jakarta, akhir Oktober 2022 lalu.

Dalam agenda BIK 2022, selain peningkatan edukasi dan literasi, lembaga jasa keuangan juga membantu masyarakat untuk lebih mudah membuka rekening tabungan, polis asuransi, ataupun rekening efek. Sepanjang Oktober 2022, gelaran BIK telah menjangkau pembukaan 2.037.105 rekening baru di perbankan.

Kemudian 64.228 pendaftaran rekening efek baru di pasar modal, pembukaan 69.091 polis asuransi baru. Selain itu, BIK juga telah menjangkau 451.638 debitur baru di

industri pembiayaan dan pembukaan 2.878.570 rekening di industri pegadaian.

Dalam rangkaian BIK 2022 ini, OJK juga menggelar pameran jasa keuangan alias Financial Expo (FinExpo) 2022. Pameran diikuti oleh 134 booth yang terdiri dari berbagai industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, *financial technology* (*fintech*), *e-commerce*, hingga para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sejumlah daerah juga ikut dalam rangkaian kegiatan. Misalnya di Kantor OJK Regional (KR) 8 di Bali dan Nusa Tenggara. Bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Bali digelar Bali Financial Experience Festival (FINEF). Termasuk peluncuran Gianyar Pay, *launching* Agen Edukasi dan Inklusi Keuangan (ADIK) OJK Bali, serta Deklarasi Gerakan Sampahmu Produk Keuanganmu.

Di KR 3 Jawa Tengah dan DIY, bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah diinisiasi pembentukan Forum Kepala Desa dan Lurah Melek Keuangan se-Jawa Tengah. Ada juga sejumlah kegiatan yang diselenggarakan di KR 6 Sulawesi, Maluku dan Papua berupa

seminar inklusi keuangan, KOJK Provinsi Riau bersama industri dan perangkat wilayah menyelenggarakan BIK Riau Expo 2022.

Sedangkan OJK Nusa Tenggara Barat (NTB), telah melaksanakan Pasar Keuangan Rakyat NTB. Kantor OJK Kalimantan Barat bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) mengadakan Financial dan UMKM Expo 2022. Sedangkan KR 5 Sumatera Bagian Utara bersama Forum Komunikasi (Forkom) LJK Sumatera Utara menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat.

Friderica menekankan melalui kegiatan BIK, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terkait produk serta layanan jasa keuangan. Dengan demikian, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia akan meningkat.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan otoritas gencar meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia agar masyarakat tidak terjebak pada aktivitas layanan keuangan ilegal.

“Kebutuhan peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini adalah untuk mengurangi risiko dan agar masyarakat tidak terjebak aktivitas keuangan ilegal,” ujarnya. ●



Pemenang KOINKU

Dalam puncak BIK 2022 ini, OJK juga mengumumkan pemenang Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) 2022 dengan total hadiah sebesar Rp 80 juta.

Dengan kompetisi mencari mencari ide-ide kreatif serta inovatif terkait model inklusi keuangan itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap inklusi keuangan.

Dalam lomba dengan tema “Inovasi Model Inklusi Keuangan Dalam Mendukung Implementasi Ekonomi Hijau” terjaring 104 proposal KOINKU yang berasal dari para Akademisi, Profesional, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Mahasiswa, dan Masyarakat Umum yang telah menyampaikan karya terbaiknya.

Dari hasil penjurian tersebut, ditetapkan pemenang KOINKU tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1 Juara 1: CARBON ADDONS

Plugin Software App Untuk Mengimbangi Jejak Karbon

Pembelian *Online* dan Membiayai Proyek Perubahan Iklim

2. Juara 2: TIM FORMULA 46

Pembiayaan Ekonomi Hijau Melalui Digitalisasi Ekosistem Perhutanan Sosial BNI

3. Juara 3: AIRUPIAH

Airupiah: Inovasi Terintegrasi Pengolahan Air Limbah Sebagai Alat Tukar Pembayaran Kredit Modal

4. Harapan 1: BRIVOLUTION

Swasembada Energi untuk Negeri

5. Harapan 2: BNIEH

GREEN - *Go Recycle Your Trash Be Money*

Kristrianti Puji Rahayu, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK mengatakan, pelaksanaan KOINKU tahun 2022 diharapkan dapat memperoleh model inklusi keuangan yang nantinya akan diimplementasikan melalui penerapan ekonomi hijau. ●



SiMolek *Edutainment*: Meningkatkan Literasi Keuangan dengan Menghibur



Sejumlah terobosan dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi hingga semua lapisan masyarakat. Termasuk untuk masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah inovatif itu seperti meluncurkan Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan (SiMolek) *Edutainment*.

Bertempat di Alun-alun Kabupaten Karanganyar, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Fredric Palit, Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan sejumlah Pimpinan Industri Jasa Keuangan resmi memperkenalkan sarana literasi keuangan yang menysasar masyarakat belum terakses informasi *online* melalui SiMolek.

Friderica Widyasari Dewi, menyebutkan kehadiran mobil literasi ini sekaligus memastikan

peningkatan pemahaman keuangan dilakukan langsung ke tengah-tengah masyarakat.

“Penyerahan mobil SiMolek ini untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses edukasi secara *online*, dan juga sesuai pesan Bapak Presiden supaya OJK memberikan edukasi dengan cara yang kreatif dan variatif, dengan mengedepankan unsur edukasi juga *entertainment*,” kata Friderica.

OJK telah menyerahkan sebanyak 54 unit mobil SiMolek *Edutainment* yang telah dilengkapi dengan perangkat audio visual, ke seluruh Indonesia melalui Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah berdasarkan luasan wilayah dan kepadatan penduduk.

Mahendra Siregar dalam sambutannya menekankan literasi keuangan merupakan jalan untuk mengatasi permasalahan keuangan di tengah masyarakat seperti praktek rentenir dan pinjaman *online* ilegal.

“Yang harus dilakukan bersama adalah penyederhanaan dari segi pendekatan industri jasa keuangan itu sendiri dan melalui SiMolek ini untuk peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat,” kata Mahendra.

Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa pemanfaatan SiMolek *Edutainment* juga disesuaikan dengan karakter daerah setempat yang dalam penyampaian edukasi kepada masyarakat dikaitkan dengan hiburan seni dan budaya lokal.

Dolfie Othniel Fredric Palit menambahkan di tengah kondisi pemulihan ekonomi saat ini, edukasi dan literasi keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kami berterimakasih kepada OJK yang mengambil inisiatif untuk memperluas edukasi kepada masyarakat dan literasi keuangan melalui peluncuran SiMolek *Edutainment* pada hari ini, sehingga masyarakat dapat membedakan mana jasa keuangan yang legal, mana jasa keuangan yang ilegal, dan kalau sudah tertipu bagaimana cara mengatasinya,” Kata Dolfie.

Mahendra Siregar menyerahkan secara simbolis mobil SiMolek *Edutainment* kepada Kepala OJK Solo Eko Yuniyanto, untuk selanjutnya dapat digunakan OJK bersama industri jasa keuangan, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya di wilayah Solo Raya dalam pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. ●



Mengenal Deposito *On Call*, Salah Satu Alternatif Menyimpan Uang

Suku bunga deposito di perbankan mulai naik sebagai respons atas meningkatnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Berbeda dengan jenis simpanan lainnya, deposito merupakan produk simpanan yang ditawarkan perbankan, pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

Deposito termasuk salah satu instrumen yang banyak dipilih karena relatif rendah risiko, terutama di tengah tekanan yang tinggi di pasar keuangan global saat ini. Produk simpanan ini umumnya memiliki jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, 12, hingga 24 bulan.

Jika ingin berinvestasi dalam jangka waktu yang pendek, sejumlah perbankan juga menawarkan produk deposito *on call*. Instrumen tersebut juga menarik bagi nasabah karena memberikan imbal hasil yang menjanjikan. Produk ini menawarkan jangka waktu yang relatif lebih singkat, mulai dari 3 hari hingga paling lama satu bulan. Namun, saldo yang dibutuhkan minimal sesuai ketentuan bank. Bahkan ada yang menerapkan mulai dari Rp10 juta.

Produk investasi deposito *on call* ini menjawab kebutuhan nasabah yang hanya butuh menyimpan dana dalam waktu relatif singkat, misalnya dana yang akan segera digunakan untuk keperluan pembayaran bisnis atau kepentingan lain.

Pada dasarnya, deposito *on call* merupakan gabungan antara deposito berjangka dan giro. Oleh karena itu, suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi dari giro dan deposito reguler. Besaran bunga pun dapat dinegosiasikan sebelum akad investasi dilakukan, utamanya berlaku bagi nasabah yang jumlah tabungannya jauh lebih besar daripada ketentuan dari pihak bank. Tentu besaran jaminan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain suku bunga yang lebih menarik dibandingkan tabungan reguler, pencairan dana deposito *on call* yang cukup mudah juga menjadi salah satu daya tarik.

Adapun, untuk menghitung besaran keuntungan deposito *on call* bisa dilakukan dengan simulasi berikut: A memiliki dana simpanan Rp500 juta. A memilih tenor deposito selama 15 hari dengan bunga yang disepakati sebesar 5%.

Rumus yang dapat digunakan yaitu: bunga deposito = suku bunga x (jangka waktu disetujui/30) x saldo pokok. Dengan demikian, maka akan didapatkan perhitungan sebagai berikut: bunga deposito = 6% x (15/30) x Rp500 juta = Rp15 juta

Jumlah tersebut belum dipotong pajak sehingga masih perlu dihitung kembali untuk mendapatkan hasil bersih. Untuk diketahui, pencairan dana dari deposito *on call* harus sesuai prosedur, paling cepat 3 hari sebelum tanggal pencairan dana. Namun, hal ini tentunya juga bergantung pada seberapa besar dana yang ditempatkan. Semakin besar jumlah dana deposito, maka waktu konfirmasi yang diperlukan juga semakin lama. ●





Little Women, Agar Uang Bukan Menjadi ‘Segalanya’

Serial drama Korea (Drakor) berjudul “Little Women” yang tayang di Netflix dan tamat pada 10 Oktober 2022, menyiratkan sejumlah potret kehidupan dan pelajaran finansial. Diadaptasi dari novel klasik karya Louisa May Alcott dengan judul yang sama, serial ini memotret kehidupan kakak-beradik perempuan untuk mencapai kehidupan yang diimpikannya.

Dari awal episode bergulir, penonton sudah mendapat gambaran bahwa kisah Little Women akan berpusat pada uang dan mimpi. Drakor ini mengisahkan tiga saudara perempuan bernama Oh In-ju (Kim Go Eun) yang sangat ingin memberi keluarganya kehidupan yang lebih baik secara finansial.

Dua adik In-Ju, Oh In-kyung (Nam Ji-hyun), wartawan di sebuah stasiun televisi, dan anak bungsu bernama Oh In-hye (Park Ji-hu), siswa sekolah seni yang sangat berbakat melukis. Suatu kali, In-Ju menemukan uang tunai 70 miliar won dalam sebuah tas ransel. Penemuan tersebut seolah menjadi jawaban atas masalah finansial yang sejak kecil mereka hadapi.

Siapa sangka bahwa uang itu adalah hasil curian teman perempuannya dari salah satu orang terkaya dan berpengaruh di Korea. Uang itu pun adalah hasil penggelapan dana si orang tajir itu. Bersamaan dengan penemuan uang tersebut, kakak-beradik itu kemudian terseret kasus kriminal dan berhadapan dengan

orang terkaya serta paling berpengaruh di Korea Selatan.

Dari drama Korea itu, setidaknya ada beberapa pelajaran tentang uang yang kita ambil.

1. Hidup bukan untuk uang, tetapi hidup butuh uang

Ada pepatah mengatakan uang bukanlah segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Little Women menegaskan kembali pepatah tersebut, dan betapa uang merupakan hal yang penting dalam kehidupan kakak-beradik itu. Hal itu terlihat dari bagaimana susah-payahnya upaya In-Ju dan In-Kyung dalam memenuhi kebutuhan adik bungsunya, In-Hye.

Dalam sebuah wawancara, Kim Go Eun menjelaskan pandangan In-Ju mengenai uang. Bahwa dia merasa membutuhkan uang untuk mengungkapkan cinta, untuk membelikan seseorang makanan, memberi tempat tinggal dan pendidikan yang baik.

2. Uang dapat mengubah seseorang

Kemiskinan dan kekayaan dapat mengubah karakter orang dan sekitarnya. Ketiga kakak-beradik itu hidup dalam kemiskinan sejak lama. Hal itu membuat mereka dipandang sebelah mata dan bahkan tak jarang mendapat hinaan. Bahkan, orang tua mereka, yang seharusnya bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga itu, harus meninggalkan rumah karena masalah uang.

3. Pernikahan tidak menjamin keamanan finansial

In-Ju dalam drama ini dikisahkan sebagai seorang yang telah bercerai. Sebelumnya, dia menikahi seorang penipu. Pengalaman pahit itu pun memberinya pelajaran bahwa pernikahan tidak memberi jaminan apa pun mengenai keamanan finansial. Masa depan keuangan In-Ju dan adik-adiknya bahkan semakin tidak pasti ketika terlibat kasus penggelapan uang.

4. Kebahagiaan keluarga tidak dijamin oleh uang

Selain keluarga Oh, ada pula keluarga Park Jae Sang yang dikisahkan dalam drama ini. Park Jae Sang diceritakan tengah ikut dalam pencalonan presiden dan karenanya harus mati-matian menjaga citranya.

Keluarga Oh yang serba kekurangan memiliki hubungan yang hangat dan saling mengasihi. Sebaliknya, keluarga Park yang bergelimang harta dan popularitas justru tak menjadi rumah yang nyaman bagi orang-orang di dalamnya.

Tak hanya empat hal di atas. Jika kita sudah menyaksikan drama tersebut, ada pelajaran tentang keluarga, persahabatan, dan kekerabatan, serta bagaimana uang mengikat hubungan-hubungan tersebut. Jika belum menontonnya, drama ini patut dipertimbangkan untuk mengisi waktu luang. Selamat menonton! ●



Berkenalan Lebih Jauh dengan iDebKu

Pembiayaan atau penyaluran kredit, tidak dipungkiri lagi, merupakan kepingan *puzzle* penting dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam konteks ini, efisiensi dan peningkatan arus pembiayaan khususnya kepada pelaku usaha menjadi hal yang patut diperjuangkan bersama.

OJK selaku lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan terus berusaha meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi debitur. Usaha ini, salah satunya, diwujudkan lewat pembuatan aplikasi iDebKu yang telah diluncurkan secara resmi per 8 November 2022.

Sebagai konteks, iDebku merupakan aplikasi layanan pemberian informasi debitur kepada masyarakat, yang dapat diakses publik secara *online* maupun *offline*. Layanan pemberian informasi menggunakan aplikasi iDebku dapat diakses masyarakat secara gratis,

atau tanpa biaya sepeser pun. Sebelumnya, sistem informasi debitur dikelola oleh Bank Indonesia (BI) dengan istilah *BI Checking*. Adanya peralihan kewenangan pengawasan perbankan dari BI kepada OJK kemudian membuat *BI Checking* digantikan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di bawah naungan OJK.

Semula, layanan SLIK dilaksanakan secara *walk-in* atau tatap muka, baik di kantor pusat OJK maupun yang di daerah. Kedatangan pandemi Covid-19 membuat layanan tatap muka tidak dapat dilakukan dan diganti dengan cara *online*, namun masih dengan mekanisme yang berbeda antara satu kantor dengan kantor lainnya. Maka, kehadiran iDebKu otomatis bakal membuat proses layanan *online* tersebut berjalan dengan lebih terintegrasi.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, iDebKu merupakan wujud

komitmen OJK atas Arah Pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (AP SLIK) 2021-2025. Layanan ini juga sejalan dengan *Destination Statement* OJK 2022-2027, serta bagian dari Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2019-2022 dan 2023-2027.

“Pertumbuhan ekonomi kita bakal terjadi memang jika kredit ini semakin hari semakin meningkat. Dan ini tentu saja, iDebKu ini, adalah salah satu sarana kami mendorong efisiensi kredit,” kata Dian. iDebKu memiliki beragam kelebihan. Mulai dari kecepatan dan kemudahan akses, hingga efektivitas waktu mengingat akses di dalam platform ini bakal terus disinergikan. Ke depan, data di dalamnya juga akan diintegrasikan dengan data Dukcapil.

Penggunaan iDebKu juga meminimalkan potensi terjadinya *human error* karena proses pemberian informasi sudah terotomatisasi. Adanya integrasi data pada sistem iDebKu di kantor pusat, regional dan wilayah OJK juga menjadi nilai tambah.

“Data dari IDEBKU tersebut dapat digunakan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank dalam mengambil keputusan pada proses pemberian kredit atau pembiayaan beban kreditur,” tambah Dian.

Lebih lanjut, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK, Teguh Supangkat menjamin bahwa pelaku jasa keuangan ataupun masyarakat tidak perlu khawatir apabila kebingungan dengan prosedur penggunaan iDebKu. Sebab, perwakilan OJK dari seluruh wilayah di Indonesia siap membantu.

“Kami telah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi IDEBKU kepada seluruh kantor perwakilan OJK,” ujarnya. ●



Membedah Modul Literasi Keuangan Digital

OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) mempublikasikan modul *Digital Financial Literacy* (DFL). Peluncuran modul ini telah dilaksanakan pada gelaran OJK Innovation Day (OVID) 2022. Sekaligus sebagai ikhtiar dalam memacu literasi keuangan digital di Indonesia.

“Sudah banyak sekali program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, tapi ada satu hal yang harus dikedepankan yaitu melek keuangan digital,” kata Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.

Menurut Friderica, ada kelompok tertentu yang membutuhkan sosialisasi keuangan digital secara lebih serius. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok anak, remaja, dan ibu-ibu.

“Pengembangan modul DFL ini tidak hanya literasi dan inklusi keuangan digital di masyarakat saja, tapi meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital, dan memitigasi risiko kejahatan siber”

Untuk tahap awal, sudah ada beberapa modul yang sudah dirilis dan dapat diakses publik secara *online* dalam bentuk buku elektronik alias *ebook*. Masing-masing adalah Modul *Choosing Service for You*, *Be a Cyber Ninja*, *Know Your Fintech* dan *Customer Support Channel*.

Sesuai namanya, *Choosing Service for You* memberikan edukasi terkait bagaimana memilih produk industri

jasa keuangan yang tepat untuk konsumen. Terkadang, niat konsumen untuk menggunakan layanan keuangan tidak sejalan dengan pemilihan produk yang sesuai dengan tujuan. Karenanya, adanya modul ini diharapkan membantu masyarakat untuk mencapai tujuan keuangannya dengan optimal lewat produk-produk digital.

Kemudian, Modul *Be a Cyber Ninja* memberikan edukasi terkait bagaimana tips tetap menggunakan produk keuangan dengan aman. Harapannya, masyarakat tidak lengah dan mengalami kerugian baik berupa materil ataupun kebocoran data karena penggunaan suatu layanan jasa keuangan.

Modul *Know Your Fintech* tidak kalah menarik. Modul ini mencoba memberikan pemahaman fundamental bagi pembaca terkait apa saja bagian dari *fintech*. Dewasa ini, *fintech* kerap diidentikkan dengan pinjaman *online* (pinjol) saja. Padahal, ada banyak kategori perusahaan *fintech* dengan layanan yang beragam dan dengan membaca modul ini,

masyarakat awam akan dapat lebih memahami.

Lalu, Modul *Customer Support Channel* memberikan informasi penting bagi masyarakat terkait bagaimana mencari solusi atau mengadu apabila mengalami masalah terkait layanan layanan *fintech*.

Tentu saja, OJK saat ini memiliki saluran pengaduan yang beragam. Namun, dengan membaca modul terakhir tersebut, pemahaman pembaca bakal lebih dalam. ●





Pentingnya Resolusi Keuangan Tahunan

Awal tahun bisa jadi menjadi momentum yang tepat untuk memulai banyak hal. Biasanya, periode ini sekaligus menjadi momentum untuk menyusun resolusi-resolusi baru, termasuk dalam hal keuangan. Meskipun resolusi-resolusi lama belum tentu terpenuhi semua, menyusun resolusi untuk awal yang baru bisa jadi kesempatan untuk berefleksi mengenai apa yang sudah dan belum tercapai.

Terlebih, tahun depan dikhawatirkan munculnya banyak guncangan ekonomi/resesi akibat inflasi yang semakin tinggi dan diikuti kenaikan suku bunga acuan. Kondisi yang akan membuat ekonomi melambat. Lalu apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk merumuskan resolusi keuangan pada 2023.



1. Lakukan evaluasi

Luangkan waktu untuk melihat setahun ke belakang, resolusi keuangan apa yang sudah tercapai dan mana yang belum. Jika belum tercapai, dimana kendala, dan bagaimana penanganannya di tahun yang baru kelak.

Kita juga bisa mempertimbangkan ulang mengenai suatu tujuan

finansial, jika dirasa sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Hal lain, mungkin tujuan itu bisa dicapai dengan jalan yang berbeda dari yang sebelumnya direncanakan. Terbuka untuk semua kemungkinan akan memudahkan mencapai tujuan.

2. Membuat catatan pemasukan dengan jelas

Bagi kalian yang hanya memiliki satu sumber pendapatan, misalnya dari gaji bulanan mungkin hal ini tidak terlalu penting. Namun, bagi yang punya banyak sumber penghasilan setiap bulannya, maka wajib untuk mencatat secara jelas semua pemasukan yang diterima, baik dari gaji, bonus, bisnis lain, dan berbagai sumber penghasilan lainnya secara terperinci.

3. Memerinci rencana pengeluaran dengan detail

Membuat rencana pengeluaran yang detail itu sangat penting, agar bisa mengalokasikan uang dengan sangat jelas. Hal ini bisa dimulai dengan menentukan pengeluaran berdasarkan skala prioritasnya, yaitu mendahulukan mana yang menjadi kebutuhan, bukan sekadar keinginan semata. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang diterima setiap bulannya.

4. Melunasi utang ataupun cicilan

Jika memiliki utang (termasuk kredit, cicilan, dan lain-lain), maka sebaiknya hal ini dijadikan sebagai salah satu prioritas yang harus segera dilunasi, baik itu dengan mulai mencicilnya ataupun melakukan pelunasan sekaligus.

5. Rutin menabung

Dari penghasilan atau gaji yang diterima setiap bulannya, sebaiknya selalu menyisihkan uang untuk ditabung secara rutin. Besarannya tentu saja bisa disesuaikan dengan pendapatan masing-masing. Namun yang jelas, kita harus menyisihkan uang untuk ditabung setiap bulannya, termasuk untuk tabungan masa tua, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Bila perlu langsung menggunakan fitur auto debit dari rekening utama ke rekening lainnya agar bisa konsisten melakukannya.

6. Menyiapkan dana darurat

Hidup ini memang tidak bisa kita tebak, segala sesuatunya bisa berubah dengan begitu cepatnya. Untuk mengantisipasi berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pengeluaran mendadak akibat sakit, kecelakaan dan lain sebagainya, perlu juga untuk menyisihkan dana darurat dalam pendapatan yang diterima setiap bulan. Upaya ini dilakukan agar pengeluaran lain tidak terganggu ketika kita membutuhkan dana darurat tersebut.

7. Mulai berinvestasi

Memulai berinvestasi bisa menjadi pilihan tepat untuk memperluas sumber pendapatan. Apalagi, saat ini jenis investasi yang tersedia sangat beragam, bisa dipilih sesuai kebutuhan, bahkan jangka waktunya pun bisa ditentukan, baik itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Namun yang jelas, melakukan investasi jauh lebih menguntungkan dibandingkan hanya menyimpan uang di bank sebagai tabungan biasa. ●

Resolusi Tahun 2023 **ingat**

S.M.A.R.T



Membeli laptop warna putih dengan RAM/Memory 16GB seharga tujuh juta rupiah dengan cara berkomitmen menabung sebesar 10% dari uang jajan bulanan yang dimiliki selama satu tahun, agar bisa membeli laptop pada akhir tahun 2023.

SPESIFIK

Laptop warna putih dengan RAM/memory 16GB

MEASURABLE

7 juta rupiah

ACHIEVABLE

Menabung

TIME RELATED

Akhir tahun 2023

RELEVAN

Menyisihkan 10% dari uang jajan bulanan



**KELUARGA SIKAPI
MENGUCAPKAN**

**SELAMAT TAHUN BARU
2023**